

**MOTIVASI CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM KONTESTASI
PEMILU 2019 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**IRVAN ALRAZZAQ
NIM. 170801091**

**MAHASISWA ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irvan Alrazzaq

NIM : 170801091

Prodi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Motivasi Calon Legislatif Perempuan Dalam Kontestasi Pemilu 2019
Di Kabupaten Aceh Barat Daya

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan seungguhnya.

Banda Aceh, 7 Desember 2022

Yang Menyatakan,



IRVAN ALRAZZAQ

**“MOTIVASI CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM
KONTESTASI PEMILU 2019 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA “**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

IRVAN ALRAZZAQ

NIM. 170801091

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A, Ph.D.
NIP. 197702191998032001



Rizkika Lhena Darwin, M.A.
NIP. 198812072018032001

**“MOTIVASI CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM
KONTESTASI PEMILU 2019 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA”**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

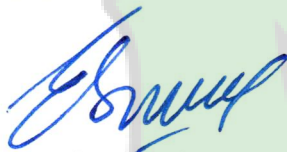
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022 M

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris

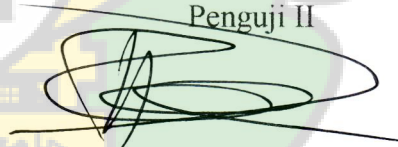
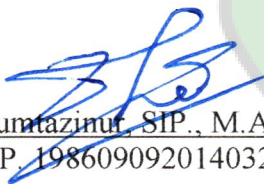


Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A, Ph.D.
NIP. 197702191998032001

Rizkika Lhena Darwin, M.A.
NIP. 198812072018032001

Penguji I

Penguji II



Muntazinur, SIP., M.A
NIP. 198609092014032002

Renaldi Safriansyah, M.H.Sc.,M.P.M
NIDN. 20070017903

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

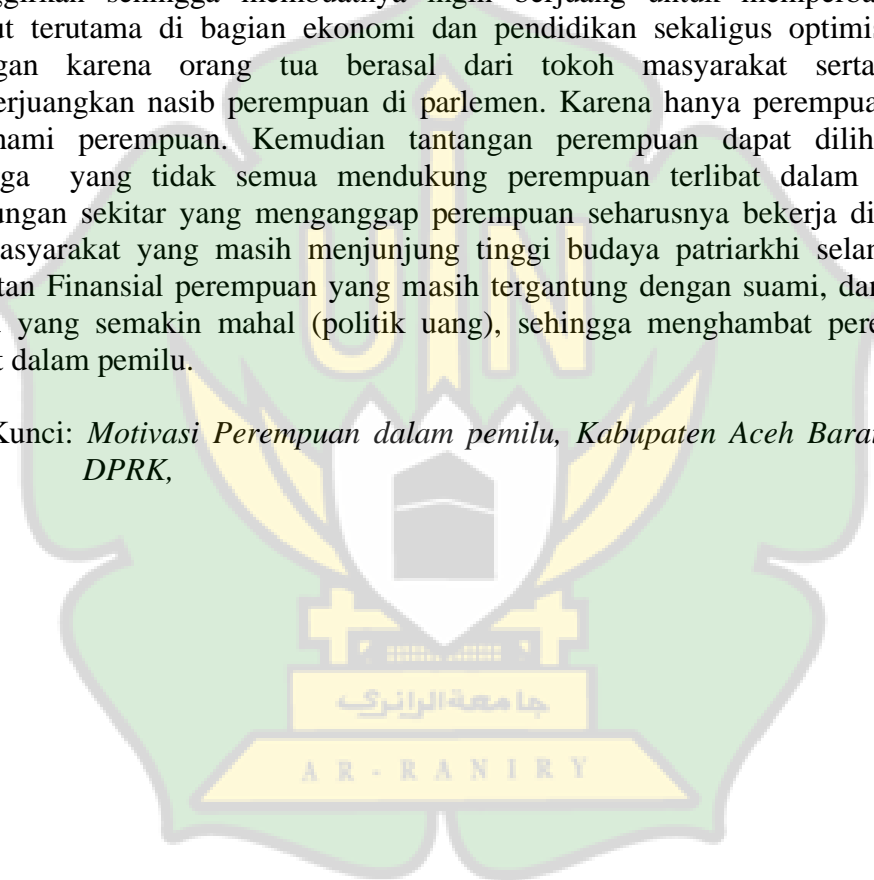


Dr. Muji Mullaz M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Motivasi Calon Legislatif Perempuan Dalam Kontestasi Pemilu 2019 Di Aceh Barat Daya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui motivasi keterlibatan perempuan dan pengaruhnya terhadap daya kompetisi pada pemilu dan untuk mengetahui tantangan keterlibatan perempuan dalam pemilu di Abdaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Hasil penelitian Adapun yang memotivasi perempuan dalam mengikuti pemilu legislative tersebut dikarenakan adanya Tuntutan dari partai karena sudah menjadi kader, kemudian melihat perempuan terpinggirkan sehingga membuatnya ingin berjuang untuk memperbaiki hal tersebut terutama di bagian ekonomi dan pendidikan sekaligus optimis dapat dukungan karena orang tua berasal dari tokoh masyarakat serta Ingin memperjuangkan nasib perempuan di parlemen. Karena hanya perempuan yang memahami perempuan. Kemudian tantangan perempuan dapat dilihat dari Keluarga yang tidak semua mendukung perempuan terlibat dalam politik, Lingkungan sekitar yang menganggap perempuan seharusnya bekerja di rumah dan masyarakat yang masih menjunjung tinggi budaya patriarki selanjutnya, Kekuatan Finansial perempuan yang masih tergantung dengan suami, dan Biaya pemilu yang semakin mahal (politik uang), sehingga menghambat perempuan terlibat dalam pemilu.

Kata Kunci: *Motivasi Perempuan dalam pemilu, Kabupaten Aceh Barat Daya, DPRK,*



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
SURAT PENGESAHAN SIDANG	ii
SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1. Penelitian Terdahulu	5
2.2. Landasan Teori.....	11
2.2.1. Gender dan Keterlibatan Politik.....	11
2.2.2. Motivasi Perempuan untuk Partisipasi Politik.....	15
2.2.3. Motivasi Politik dan Mobilisasi Politik.....	18
2.2.4. Partisipasi Perempuan dalam Politik	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1. Pendekatan Penelitian	23
3.2. Fokus Penelitian.....	23
3.3. Lokasi Penelitian.....	23
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	24
3.5. Informan Penelitian.....	24
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
4.1. Gambaran Umum Perempuan di Abdyia	28
4.2. Motivasi Keterlibatan Perempuan Dan Pengaruhnya Terhadap Daya Kompetisi Pada Pemilu	32
4.3. Tantangan Perempuan Dan Keterlibatan Dalam Pemilu Di Abdyia.....	51
BAB V PENUTUP	62
5.1. Kesimpulan	62
5.2. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Keberadaan perempuan Indonesia mengalami banyak perubahan saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dari data statistic BPS yang menyebutkan peningkatan perempuan dari segi pendidikan, akses ruang public, posisi di pemerintahan maupun private sector. Walaupun secara jumlah tidak dominan, dimana masih kerap dapat dilihat budaya patriarki masih berlangsung dalam dimensi kehidupan masyarakat, termasuk dalam dunia politik praktis. Representasi perempuan di ranah politik sudah terlihat walaupun belum cukup maksimal. Kebijakan affirmative action sudah diatur untuk mendorong keterwakilan perempuan, dimana setiap partai politik di setiap dapil harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Namun dalam proses pemilihan, maka kuasa suara ada pada masyarakat sebagai konstituen. Bagi perempuan untuk mendapatkan ‘kursi’ dituntut berperan lebih kuat, berkorban lebih banyak dari berbagai aspek dengan porsi yang lebih dari kehidupan mereka. Perempuan selain di ranah konstituen, juga harus bernegosiasi dengan suami dan keluarga atas keterlibatan dirinya dalam politik praktis. Karena tradisi masyarakat yang patriarkinya cenderung masih kental, keterlibatan perempuan di ranah publik seperti di ranah politik adalah keterlibatan yang belum sepenuhnya biasa dan wajar.¹

¹ Fariska Novianda Beltim, Motivasi Keterlibatan Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilu 2019 di Kota Pangkalpinang *Jurnal Sosial dan Saint* jilid. 1 No. 8, 2021

Fenomena tersebut terjadi hampir di banyak daerah di Indonesia, termasuk pula Aceh Barat Daya (Abdya). Affirmative action mendorong begitu banyak perempuan yang hadir dan terlibat dalam pemilu. Pada pemilu legislative di Abdya, dari 15 partai politik, terdapat 378 calon legislative yang memperebutkan 25 kursi di DPRK Abdya pada pemilu 2019. Dari total tersebut terdiri dari 136 caleg yang notabene perempuan dan selebihnya adalah laki-laki. Dari 25 kursi yang diperebutkan, para caleg perempuan harus bersaing dengan sesama caleg perempuan dan caleg laki-laki untuk mendapatkan suara dari 96.454 pemilih. Secara spesifik, Abdya terdiri dari 3 Dapil. Dapil 1 meliputi kecamatan Blang Pidie, Susoh dan Jeumpa, dapil 2 meliputi Kecamatan Setia, Tangan-tangan, Manggeng dan Lembah Sabil, dan dapil 3 meliputi Kecamatan Kuala Batee dan Babahrot. Untuk Dapil I berjumlah 102 orang, Dapil II berjumlah 149 orang dan Dapil III berjumlah 127 orang. Sebelumnya, jumlah Caleg sebanyak 379 orang, namun satu caleg dari partai Golkar mengundurkan diri karena sudah menjadi PNS sehingga tersisa 378 orang. Selain itu, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) keseluruhan berjumlah 344 TPS yang tersebar di 132 gampong dari 9 kecamatan di kabupaten Abdya.

Pada Dapil I, rata-rata perempuan yang mau sebagai calon legislative memiliki latar belakang diantaranya ibu rumah tangga, guru honorer dan ibu-ibu PKK, Dari keseluruhan latar belakang tersebut, yang paling dominan adalah ibu rumah tangga. Begitu pula Dapil II kebanyakan yang mencalonkan diri dari ibu rumah tangga. Selanjutnya Dapil III terlihat lebih dominan dari ibu-ibu PKK. Besarnya porsi perempuan dalam memenuhi kuota pencalonan, menjadi menarik

untuk diteliti. Dengan notabene latar belakang sebagai Ibu Rumah Tangga, menarik meneliti bagaimana motivasi politik mereka terlibat dalam pemilu. Peneliti ingin melihat sejauh mana motivasi, pengalaman dan jaringan serta kesiapan psikologi politik pada caleg perempuan dalam menghadapi kontestasi pemilu. Maka dari itu penulis ingin meneliti tentang : **Motivasi Calon Legislatif Perempuan Dalam Kontestasi Pemilu 2019 di Abdya.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil dari latar belakang tersebut maka berikut rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apa Motivasi keterlibatan perempuan terhadap daya kompetisi pada pemilu?
2. Apa tantangan keterlibatan perempuan dalam pemilu di Abdya?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Motivasi keterlibatan perempuan terhadap daya kompetisi pada pemilu
2. Untuk mengetahui tantangan keterlibatan perempuan dalam pemilu di Abdya

1.4. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis.

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kepustakaan dibidang Ilmu Politik, terutama yang berkaitan tentang motivasi calon legislatif perempuan dalam kontestasi pemilu 2019 di Abdy.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian yang relevan

Penelitian pertama dilakukan oleh Fariska Novianda Beltim dikutip dari Jurnal Sosial dan Saint jilid. 1 No. 8, 2021 dengan judul Motivasi Keterlibatan Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilu 2019 di Kota Pangkalpinang. Indonesia menggunakan sistem pemilihan untuk menduduki lembaga perwakilan rakyat: DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menjelaskan tentang pemberian sanksi kepada partai politik di daerah pemilihan tertentu akan terancam gugur jika daftar pemilu tidak mencukupi kuota 30% keterwakilan perempuan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui motivasi keterlibatan calon legislatif perempuan pada pemilu 2019 di Kota Pangkalpinang. Keterlibatan perempuan yang tergabung dalam pencalonan diri sebagai anggota legislatif apakah niat dari hati nurani atau melalui ajakan teman atau saudara untuk ikut hanya dalam pemenuhan kuota saja. Penelitian ini menggunakan Feminisme Liberal yang berfokus pada hak-hak individu dan teori kesempatan, dan juga beragumen bahwa perubahan kebijakan hukum dan sosial akan membantu perempuan mencapai ini. Dengan begitu feminisme liberal juga menginginkan agar wanita dapat setara dengan pria. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Motivasi Keterlibatan Caleg Perempuan DPRD di Kota Pangkalpinang 2019 lebih dari 50 jumlah perempuan yang terlibat pencalonan adalah untuk memenuhi kuota, ada yang memang sudah menjadi

kader partai tetapi ikut untuk memenuhi kuota dan ada juga yang bukan sama sekali kader partai tetapi diajak sanak saudaranya untuk ikut meramaikan.²

Peneleitian kedua dilakukan oleh Eka Dian Aprilia dikutip dari Jurnal Program Studi Psikologi Universitas Syiah Kuala, Jil. 07, No. 02, 2016 dengan judul Motivasi Caleg Perempuan di Tinjau dari asal Partai Politik. Kesetaraan gender merupakan hal yang paling penting untuk mencegah diskriminasi yang terjadi di masyarakat. Terdapat beberapa cara untuk mencapai jenis kelamin, salah satunya dengan memberikan kesempatan pada perempuan untuk memengaruhi kebijakan politik seperti berpartisipasi dalam politik dengan menjadi calon legislatif. Persentase perempuan yang rendah di lembaga legislatif, khususnya legislatif di Aceh menunjukkan bahwa perempuan masih belum berpartisipasi aktif. Faktor penyebab utamanya proporsi perempuan adalah motivasi yang rendah. Motivasi merupakan pendorong tingkah laku individu sesuai arah tujuan. Ada tiga jenis kebutuhan yang mempengaruhi tingkah laku individu yaitu membutuhkan untuk kekuatan, membutuhkan untuk afiliasi dan butuh atau pencapaian. Berdasarkan belakang belakang penelitian tersebut ini bertujuan untuk melihat perbedaan motivasi calon legislator perempuan ditinjau dari pesta nasional dan pesta lokal. penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik bertujuan pengambilan sampel. sampel dalam penelitian ini membuka kembali 69 calon legislatif, yang terdiri dari 35 caleg pesta lokal dan 34 caleg partai nasional. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala motivasi yang terdiri dari 24 pernyataan. Hasil analisis data

² Fariska Novianda Beltim, *Motivasi Keterlibatan Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilu 2019 di Kota Pangkalpinang* Jurnal Sosial dan Saint Jil. 1 No. 8, 2021

menggunakan kamustatistik jiik mandiri uji -t mples menunjukkan nilai $P=0,023$ ($0,023 < 0,05$). Berdasarkan hal tersebut dapat kata kunci bahwa ada perbedaan motivasi pada caleg perempuan partai nasional dengan caleg perempuan partai lokal.³

Penelitian ketiga ditulis oleh Mariatul Kiptiah dikutip dari Jurnal Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Politeknik Negeri Tanah Laut Volume 5, Nomor 1, Mei 2019 dengan judul Motivasi Keterwakilan Perempuan dalam Politik pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Tanah Laut. Keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif merupakan gambaran proses demokrasi dimana partai-partai politik memberikan otoritas bagi perempuan untuk membuat kebijakan yang berorientasi dalam pemenuhan hak-hak perempuan khususnya kesetaraan gender. Gambaran demokrasi yang dilakukan melalui motivasi atau keinginan bagi para calon legislatif perempuan sebagai pemenuhan hak keterwakilan perempuan di politik pada saat nanti terpilih sebagai wakil rakyat dapat membawa aspirasi masyarakat dan membawa arah kebijakan pembangunan bagi daerah. Penelitian ini menggunakan analisis deskripsi kualitatif (cualitative research approach) dengan cara pengumpulan data survei, wawancara mendalam, pembagian kuesioner terhadap responden yang diteliti sebanyak 6 anggota legislative incumbent dan 10 orang terdaftar sebagai DCT oleh KPU. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendapat para responden dalam menentukan keadaan motivasi pada caleg perempuan dengan menggunakan

³ Eka Dian Aprilia, *Motivasi Caleg Perempuan di Tinjau dari asal Partai Politik. Kesetaraan gender merupakan hal yang paling penting untuk mencegah diskriminasi yang terjadi di masyarakat*, Jurnal Program Studi Psikologi Universitas Syiah Kuala, Jil. 07, No. 02, 2016.

Statistical Package For Social Science (SPSS) versi 16. Adapun hasil penelitian yang dilakukan bahwa persentase keterwakilan perempuan dalam pemilu yang dilaksanakan dalam waktu 5 tahun sekali mengalami peningkatan dari pemilu 1992-1999 sebesar 9.2%, pemilu 1999-2004 sebesar 11, 8%, tahun 2004-2009 sebesar 18,2% dan 2009-2014 sebesar 17,3%. Ini menggambarkan bahwa representasi partisipasi keterwakilan caleg perempuan mengalami kenaikan dalam pemilu. Jumlah partisipasi pemilih perempuan di kabupaten Tanah Laut serta motivasi Caleg perempuan dalam pemenuhan kuota 30 persen dalam kategori tinggi dengan persentase 100%. Artinya caleg perempuan di Tanah Laut sudah memiliki strategi untuk mendapatkan perolehan suara dalam persaingan politik sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing.⁴

Penelitian keempat ditulis oleh Irsyad Jomira dengan judul Keterwakilan Perempuan Dalam Legislatif Terkait Budaya Patriarki Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Latar Belakang (GAP): Rendahnya keterwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota disebabkan oleh budaya patriarki yang menyebabkan publik figur perempuan belum maksimal dalam pendekatan dengan masyarakat. Jumlah anggota Legislatif Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2019-2024 yaitu 35 orang tetapi hanya 2 orang anggota legislatif perempuan atau sekitar 5.71% sehingga belum mencapai harapan yang diisyaratkan Undang-undang Afirmatif action sebesar 30%. Tujuan: untuk mengetahui keterwakilan perempuan di

⁴Mariatul Kiptiah, *Motivasi Keterwakilan Perempuan dalam Politik pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Tanah Laut. Jurnal Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Politeknik Negeri Tanah Laut Volume 5, Nomor 1, Mei 2019.*

DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Teori yang digunakan adalah teori keterwakilan Pitkin yang memiliki empat dimensi yaitu wakil, yang diwakili, substansi perwakilan dan konteks. Metode : yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan menggambarkan secara deskriptif. Hasil/ Temuan: menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam legislatif hanya untuk pemenuhan kuota sebatas dan perempuan masih lemah dalam pendekatan dengan masyarakat serta masih tingginya budaya Patriarki. Kesimpulan: Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan meningkatkan Keterwakilan Perempuan dalam Legislatif terkait Budaya Patriarki yaitu agar setiap partai politik mengutamakan pendidikan politik dengan menyiapkan kaderisasi sehingga kader bisa turun langsung dan bersosialisasi dengan masyarakat, Menguatkan demokrasi dengan memberikan gagasan terkait Undang-undang pro, Merumuskan suatu pola calon legislatif perempuan oleh partai politik, yang bertujuan calon legislatif tersebut ketika terpilih memang betul memberikan kontribusi dan peran nyata dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai wakil rakyat, Kepada lembaga Penyelenggaraan pemilu diharapkan mampu memberikan sosialisasi yang tidak hanya fokus kepada 30% keterwakilan perempuan, apabila tidak mengalami perubahan yang signifikan maka dibuatkan pembaharuan tentang Kuota anggota DPRD khusus perempuan.

Penelitian kelima ditulis oleh Siti Hajar Sri Hidayati dengan judul Perbedaan Motivasi Calon Legislatif Di Banda Aceh Ditinjau Dari Jenis Kelamin. Kesetaraan gender merupakan hal yang paling penting untuk mencegah diskriminasi yang terjadi di masyarakat. Terdapat beberapa cara untuk mencapai

kesetaraan gender, salah satunya dengan memberikan kesempatan pada perempuan untuk mempengaruhi kebijakan politik seperti berpartisipasi dalam politik dengan menjadi calon legislatif. Persentase perempuan yang rendah di lembaga legislatif, khususnya legislatif di Aceh menunjukkan bahwa perempuan masih belum berpartisipasi aktif. Faktor penyebab minimnya persentase perempuan adalah motivasi yang rendah. Motivasi merupakan pendorong tingkah laku individu sesuai arah tujuan. Ada tiga jenis kebutuhan yang mempengaruhi tingkah laku individu yaitu *need for power*, *need for affiliation* dan *need for achievement*. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan motivasi calon legislatif ditinjau dari jenis kelamin. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis dan menggunakan teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 12 calon legislatif yang berasal dari partai lokal maupun nasional. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan *interview guide* yang terdiri dari 11 pernyataan. Hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan motivasi pada caleg laki-laki dan caleg perempuan ketika mencalonkan diri pada pemilu 2014. Caleg laki-laki lebih didominasi oleh *need for power* yang merupakan suatu kebutuhan untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain sehingga orang tersebut mengikuti apa yang diperintahkan tanpa ada paksaan. Hal ini berbeda dengan caleg perempuan yang lebih didominasi oleh *need for affiliation* yang merupakan suatu kebutuhan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan interpersonal dengan orang lain.

Penelitian keenam dilakukan oleh Wenny Dwika Paradita dengan judul Partai Politik Dan Kontestasi Perempuan Dalam Pemilu 2019 Di Kabupaten Batang. Keterlibatan perempuan pada salah satu kontestasi politik terutama dalam Pemilu legislatif merupakan suatu hal yang positif dalam upaya pemenuhan kuota keterwakilan perempuan 30%. Riset ini mengeksplorasi kontestasi perempuan dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Batang dan bagaimana partai politik pendukung mengambil peran didalamnya. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitis dengan teknik wawancara mendalam terhadap informan calon legislatif perempuan di Kabupaten Batang dan partai politik pendukung. Hasil penelitian ini adalah 1) kontestasi perempuan dipengaruhi oleh hambatan pribadi, institusi politik, hambatan sosio-kultural, hambatan ekonomi, dan *money politic* 2) partai politik pendukung masih sangat minim memberi pendampingan kepada kandidat perempuan ketika pemilihan dilaksanakan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Gender dan Keterlibatan Politik

Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan kurang tertarik, terinformasi, dan manjur secara politik dibandingkan laki-laki dan bahwa kesenjangan gender ini dalam keterlibatan politik memiliki konsekuensi untuk partisipasi politik. Hanya ketika perbedaan gender dalam kepentingan politik, informasi, dan kemandirian dipertimbangkan bersama dengan perbedaan gender dalam sumber daya, kami dapat menjelaskan perbedaan yang relatif kecil antara jenis kelamin sehubungan dengan aktivitas politik. Ketika kami mencari asal mula

kesenjangan gender dalam keterlibatan politik, kami menemukan bahwa itu hanya dapat dijelaskan sebagian oleh perbedaan gender dalam faktor-faktor seperti pendidikan yang dikaitkan dengan keterlibatan politik. Lebih jauh lagi, perbedaan gender dalam orientasi politik ini tampaknya khusus untuk politik-bukan manifestasi dari atribut pribadi umum.⁵

Investigasi sejauh mana isyarat yang diterima oleh laki-laki dan perempuan bahwa politik adalah dunia laki-laki yang bertanggung jawab atas kesenjangan gender dalam keterlibatan politik menghasilkan hasil yang sugestif, tetapi beragam. Terlepas dari kesetaraan yang terkenal antara laki-laki dan perempuan dalam jumlah pemilih, kesenjangan gender yang membingungkan tetap ada sehubungan dengan keterlibatan politik warga negara. Dibandingkan dengan perempuan, laki-laki lebih berpengetahuan dan lebih tertarik pada politik dan lebih cenderung merasa efektif secara politik. Meskipun perbedaan ini belum menjadi tema utama dalam literatur tentang gender dan politik, telah dicatat oleh sejumlah peneliti. Tidak hanya perbedaan dalam keterlibatan politik bertahan dari waktu ke waktu.⁶

Dalam literatur tentang orientasi warga negara terhadap politik, perbedaan gender ini telah dikaitkan dengan kerugian perempuan sehubungan dengan sumber daya yang terkait dengan keterlibatan politik dan perbedaan gender dalam peran sosial dan tanggung jawab keluarga. Mereka juga telah ditafsirkan sebagai

⁵ Darren G. Lilleker & Karolina Koc-Michalska, *Political Communication, Faculty of Media & Communication, Bournemouth University*. Karolina Koc-Michalska is Associate Professor in the Communication and Culture Department, Audencia Business School, Nantes. 2016

⁶ Ibid

manifestasi dalam politik dari seperangkat predisposisi yang lebih umum yang membedakan perempuan dan laki-laki, khususnya, agresivitas dan selera konflik laki-laki yang lebih besar.

Dalam makalah ini kami menyelidiki perbedaan gender dalam pengetahuan politik, kemandirian, dan minat dan upaya, tidak sepenuhnya berhasil, untuk menjelaskan asal-usulnya. Penelitian ini akan berjalan dalam tiga tahap: Kami mulai dengan menyajikan data deskriptif yang menunjukkan bahwa perbedaan gender dalam informasi politik, kemandirian, dan kepentingan cukup konsisten di berbagai ukuran orientasi politik. Selanjutnya, kami menunjukkan bahwa perbedaan gender dalam keterlibatan politik memiliki konsekuensi: perbedaan kecil antara perempuan dan laki-laki dalam hal partisipasi politik menghilang hanya ketika perbedaan dalam keterlibatan ini diperhitungkan.

Akhirnya, kami berusaha untuk menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kepentingan politik, informasi, dan kemandirian dalam hal sejauh mana hal itu dapat dijelaskan oleh perbedaan karakteristik sosial lainnya yang terkait dengan gender, yang ditafsirkan sebagai manifestasi khusus dari perbedaan yang lebih umum antara perempuan dan laki-laki atau dijelaskan oleh fakta bahwa dunia politik secara tradisional didominasi oleh laki-laki.⁷

Analisis kami menggunakan data dari Studi Partisipasi Warga, yang memiliki serangkaian ukuran yang sangat luas dari berbagai aspek keterlibatan politik, khususnya, sepuluh item yang menguji pengetahuan tentang politik.

⁷ Ibid

Penulis menentukan hubungan ini dengan berbagai cara. Misalnya, sementara Baxter dan Lansing mengaitkan perbedaan gender dalam kepentingan politik dengan perbedaan sumber daya, Flora dan Lynn mengaitkan perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam kemandirian politik dengan peran sosial berbasis gender. Membahas perempuan saja, Rinehart menemukan bahwa kesadaran gender berperan dalam menjelaskan keterlibatan politik. Sapiro atribut untuk perbedaan privatisasi di antara perempuan dalam pengetahuan politik dan privatisasi dan perbedaan peran sosial di antara perempuan dalam kemandirian.⁸

Sehubungan dengan sebagian besar bentuk kegiatan politik selain pemungutan suara, perempuan sedikit kurang aktif dibandingkan laki-laki, perbedaan yang sebagian, tetapi tidak sepenuhnya, dijelaskan oleh kerugian perempuan sehubungan dengan sumber daya-terutama uang dan keterampilan sipil- yang penting dalam memfasilitasi partisipasi politik. Seperti yang akan kita lihat, hanya ketika perbedaan kepentingan politik, informasi, dan kemandirian diperhitungkan barulah perbedaan gender dalam partisipasi menghilang. Fakta bahwa disparitas partisipasi berpotensi menyebabkan disparitas responsivitas pemerintah terutama meresahkan secara normatif ketika ketidaksetaraan dalam partisipasi adalah akibat dari defisit dalam hal sumber daya partisipatif, terutama keterampilan sipil dan uang. Para ekonom secara tradisional menganggap preferensi sebagai sesuatu yang diberikan dan menghindari sejumlah masalah rumit dengan tidak mempertanyakan dari mana preferensi itu datang. Sebaliknya,

⁸ Ibid

dalam analisis politik sering dianggap produktif secara intelektual untuk menyelidiki asal usul preferensi.⁹

Data kami memungkinkan kami untuk mempertimbangkan apakah keterlibatan politik perempuan yang lebih rendah dapat merupakan "preferensi yang dibangun" -bukan selera yang dipilih secara bebas tetapi cerminan dari fakta bahwa politik secara tradisional, dan terus, didominasi oleh laki-laki.

2.2.2. Motivasi Perempuan untuk Partisipasi Politik.

Perempuan dan laki-laki memilih dan menjadi sukarelawan untuk kampanye politik dengan frekuensi yang sama tetapi kesenjangan tetap ada dalam kepentingan politik, pengetahuan, dan kemandirian perempuan dibandingkan dengan laki-laki, meskipun ada peningkatan dalam sumber daya perempuan seperti pendidikan dan pendapatan. Literatur tentang perbedaan gender dalam partisipasi politik Literatur yang ada menemukan bahwa perempuan cenderung kurang tertarik pada politik, menunjukkan tingkat pengetahuan politik yang lebih rendah, dan mengekspresikan perasaan kemandirian eksternal yang lebih rendah, atau kekuatan untuk mempengaruhi sistem politik, daripada laki-laki. Konsekuensi dari kesenjangan ini dapat membuat perempuan lebih ragu untuk mengekspresikan preferensi politik mereka. Untuk alasan inilah pemahaman yang lebih lengkap tentang motivasi perempuan untuk partisipasi politik diperlukan.¹⁰

⁹ Ibid

¹⁰ L.A. (Lisa) Lambert, *Women's Motivations for Political Participation*, Political Science Association Vancouver, British Columbia, June 3-7, 2008.

Fakta bahwa ada perbedaan gender dalam partisipasi politik sudah mapan. Alasan perbedaan gender umumnya dijelaskan oleh satu atau lebih dari penjelasan berikut: perempuan cenderung tidak memiliki sumber daya untuk berpartisipasi (pendidikan, pendapatan, status sosial-ekonomi, dan waktu); perempuan kekurangan modal sosial yang dibutuhkan untuk menggunakan jaringan mereka demi keuntungan politik; dan perempuan disosialisasikan sejak masa kanak-kanak untuk melihat kerja peduli mereka sebagai kebalikan dari partisipasi politik. Sumber daya jelas penting bagi partisipasi perempuan.¹¹

Dalam studi Kanada dan Amerika oleh L.A. (Lisa) Lambert, satu sumber daya, pendidikan, telah diidentifikasi sebagai satu-satunya prediktor terpenting dari kepentingan politik, pengetahuan politik, dan kemauan untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap sebagai penyeimbang yang hebat bagi perempuan karena penting untuk meningkatkan sumber daya lain seperti pendapatan dan status sosial-ekonomi. Pendidikan adalah sumber daya penting dan prediktor kunci untuk partisipasi politik tetapi tidak cukup untuk menjelaskan perbedaan gender dalam partisipasi. Bertahannya perbedaan gender dalam pengetahuan, terlepas dari pendidikan, menunjukkan bahwa ada faktor lain yang berperan. Komitmen waktu perempuan juga disalahkan atas tingkat partisipasi yang lebih rendah menemukan bahwa perempuan yang merawat tenaga kerja tampaknya tidak menjelaskan perbedaan gender dalam pengetahuan politik karena perempuan tanpa anak tidak lebih mungkin dibandingkan perempuan dengan anak untuk memiliki tingkat pengetahuan politik yang lebih tinggi. Beban merawat tenaga

¹¹ Ibid

kerja tidak cukup untuk menjelaskan perbedaan antara perempuan dan laki-laki sehubungan dengan pengetahuan politik tetapi beban kepedulian mungkin menjadi bagian dari keputusan perempuan untuk memasuki kehidupan politik. Beban merawat tenaga kerja mungkin menjadi faktor pribadi dalam pilihan seorang perempuan untuk menjadi peserta politik yang aktif.¹²

Kelompok penjelasan lain untuk kesenjangan gender dalam partisipasi politik adalah modal sosial, atau keterlibatan sipil. Karena salah satu cara utama kita membangun jaringan sosial adalah di tempat kerja, perempuan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal modal sosial karena semakin sedikitnya jam kerja perempuan di luar rumah. Penjelasan ketiga untuk kesenjangan gender, sosialisasi, adalah cara kita belajar berperilaku di lingkungan budaya kita. Sosialisasi politik melibatkan transmisi implisit isyarat, norma, dan praktik politik. Perempuan mungkin menerima isyarat bahwa politik tidak sesuai untuk perempuan sehingga mereka menunjukkan tingkat minat, pengetahuan, dan kemandirian politik yang lebih rendah. Metodologi Sebagian besar pekerjaan tentang kesenjangan gender dalam partisipasi politik menggunakan survei skala besar untuk menilai perilaku politik, pengetahuan politik, kepentingan politik, dan kemandirian politik perempuan.¹³

Sementara survei skala besar terbukti sangat baik dalam melacak tren kesenjangan gender ini, survei tersebut tidak menyediakan alat untuk melakukan analisis yang memuaskan tentang penyebab kesenjangan gender ini. Meskipun

¹² Ibid

¹³ Ibid

kita dapat mengukur kesenjangan gender, kita belum menghasilkan jawaban yang memuaskan untuk menjelaskan mengapa kesenjangan itu bertahan. Pendekatan lain, kelompok fokus, menawarkan cara yang berpotensi berguna untuk memeriksa faktor-faktor apa yang memengaruhi kesenjangan gender ini faktor-faktor yang tidak dapat ditangkap atau diukur dalam kuesioner dan survei. Kelompok fokus mungkin merupakan pendekatan yang tepat untuk menangkap peran faktor-faktor seperti peran sebagai ibu, peran gender dan tidak adanya model politik. Pada paruh pertama tahun 2007, Pusat Sumber Daya Womanspace di Lethbridge, AB mengontrak saya untuk mengadakan kelompok fokus dengan wanita di pedesaan, Alberta selatan untuk menyelidiki ide-ide mereka tentang partisipasi politik, kepentingan politik, pengetahuan politik, dan kemandirian politik.¹⁴

Fokus kelompok dilakukan dengan kelompok wanita yang sudah mapan. Pemimpin kelompok dihubungi untuk izin untuk melakukan kelompok fokus dengan anggota kelompok dan kelompok fokus diadakan selama waktu pertemuan yang dijadwalkan secara teratur untuk memastikan partisipasi yang maksimal. Kelompok wanita yang ada menyediakan kumpulan wanita yang mungkin tidak menghadiri kelompok fokus politik atau menanggapi iklan untuk peserta kelompok fokus. Kelompok yang ada juga dimanfaatkan untuk menciptakan lingkungan di mana perempuan merasa nyaman untuk mengekspresikan perasaan dan pendapat mereka secara bebas, tanpa mempedulikan cara orang asing memandang pendapat atau pengetahuan politik mereka. Beberapa kelompok

¹⁴ Ibid

adalah koperasi prasekolah lingkungan, beberapa kelompok keadilan sosial berbasis gereja, dan beberapa kelompok dengan minat rekreasi bersama. Perempuan diminta untuk menggambarkan tingkat kepentingan politik mereka dan mendiskusikan apa politik.¹⁵

2.2.3. Motivasi Politik dan Mobilisasi Politik

Teknologi digital menawarkan peluang untuk terlibat dalam berbagai kegiatan berorientasi masyarakat, yang masing-masing dapat berkontribusi pada keterlibatan demokratis yang lebih dalam. Tindakan konvensional partisipasi politik dikatakan didorong terutama oleh motivasi intrinsik yang berkaitan dengan self-efficacy dan pemberdayaan, dengan peserta merasa mereka dapat memiliki pengaruh atas pembuat keputusan. Penelitian kecil mengeksplorasi apakah motivasi serupa mendorong partisipasi dalam tindakan yang kurang konvensional, serta apakah upaya mobilisasi melalui media sosial oleh rekan sebaya atau organisasi politik memediasi motivasi tersebut. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik sama-sama penting tetapi motivasi ekstrinsik memiliki kekuatan penjasar terkuat yang terlepas dari lingkup aktivitas.¹⁶

Efek mediasi dari taktik mobilisasi memiliki efek minimal pada motivasi ekstrinsik, online atau offline, tetapi motivasi intrinsik online kehilangan kekuatan penjasarnya. Karena faktor intrinsik menawarkan sedikit kekuatan penjasar, beberapa bentuk partisipasi politik online mungkin kurang bermakna bagi individu. Sebaliknya, tindakan non-konvensional ini dihasilkan dari pencarian

¹⁵ Ibid

¹⁶ Kristi Andersen, *Working Women And Political Participation, 1952-1972*, *American Journal Of Political Science*, Xix, 3, August 1975

hadiah dan lebih mungkin didorong oleh organisasi kampanye non-pemerintah, menunjukkan bahwa pengguna media sosial kemungkinan besar melakukan tindakan sederhana untuk mendukung tujuan yang tidak kontroversial. Kata kunci partisipasi politik, teori penentuan nasib sendiri, mobilisasi, media sosial Motivasi dan Mobilisasi di Era Digital Partisipasi politik tidak lagi dapat didefinisikan secara murni dalam hal upaya tinggi, tindakan offline.¹⁷

Partisipasi politik sekarang mencakup berbagai bentuk, yang mencakup bentuk tradisional, seperti pemungutan suara, mengajukan petisi kepada pemerintah, menghubungi perwakilan terpilih, dan mengambil bagian dalam demonstrasi, serta tindakan non-konvensional yang dilakukan menggunakan teknologi digital, yang tampaknya lebih diarahkan menuju mengekspresikan pandangan, mendukung atau sebaliknya, daripada mempengaruhi pembuat keputusan. Kebanyakan tindakan konvensional dapat dilakukan dengan menggunakan platform digital; namun, media sosial juga memungkinkan pengguna untuk membuat atau bergabung dengan komunitas yang melampaui batas-batas negara, memulai atau berkontribusi pada diskusi, mengiklankan dukungan untuk tujuan, dan mempromosikan karya berbagai tokoh nasional

Darren G. Lilleker adalah Associate Professor di bidang Komunikasi Politik, Fakultas Media & Komunikasi, Universitas Bournemouth. Teknologi digital dengan demikian menyediakan berbagai cara baru untuk terlibat dalam bentuk

¹⁷ Ibid

perilaku yang berorientasi pada masyarakat. Organisasi politik mendorong pendukung untuk terlibat dalam bentuk perilaku ini melalui platform digital.¹⁸

Sedikit penelitian, bagaimanapun, menangkap bagaimana rangsangan yang diterima melalui teknologi digital bergabung dengan kecenderungan individu untuk menciptakan kondisi untuk partisipasi politik. Penelitian kami mengeksplorasi apa yang memotivasi warga untuk mengejar rangkaian partisipasi, khususnya menguji kekuatan motivasi intrinsik dan ekstrinsik dan sejauh mana ini dimediasi oleh komunikasi persuasif. Sementara serangkaian keadaan yang tidak biasa, keterlibatan tinggi yang diprediksi menawarkan kesempatan untuk mengumpulkan data, yang diambil dari survei perwakilan warga Inggris, untuk memahami sejauh mana, dan motivasi untuk, partisipasi konvensional dan non-konvensional. Kami melanjutkan untuk membuat konsep motivasi dan mobilisasi sebelum memberikan rincian tentang metodologi, menyajikan dan menganalisis data dan menawarkan petunjuk untuk penelitian lebih lanjut.¹⁹

Motivasi Intrinsik mewakili interaksi antara sikap pribadi terhadap tindakan tertentu dan persuasi eksternal. Motivasi intrinsik bergantung pada sikap pribadi yang memberikan evaluasi hedonis atas tindakan yang menilai, misalnya, apakah suatu tindakan menyenangkan dan memuaskan secara pribadi. Studi telah menunjukkan bahkan tampaknya perilaku altruistik dapat dijelaskan sebagian atau seluruhnya melalui motivasi egois; misalnya, motivasi dominan aktivis politik adalah intrinsik: mencari kesenangan, realisasi diri dan

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

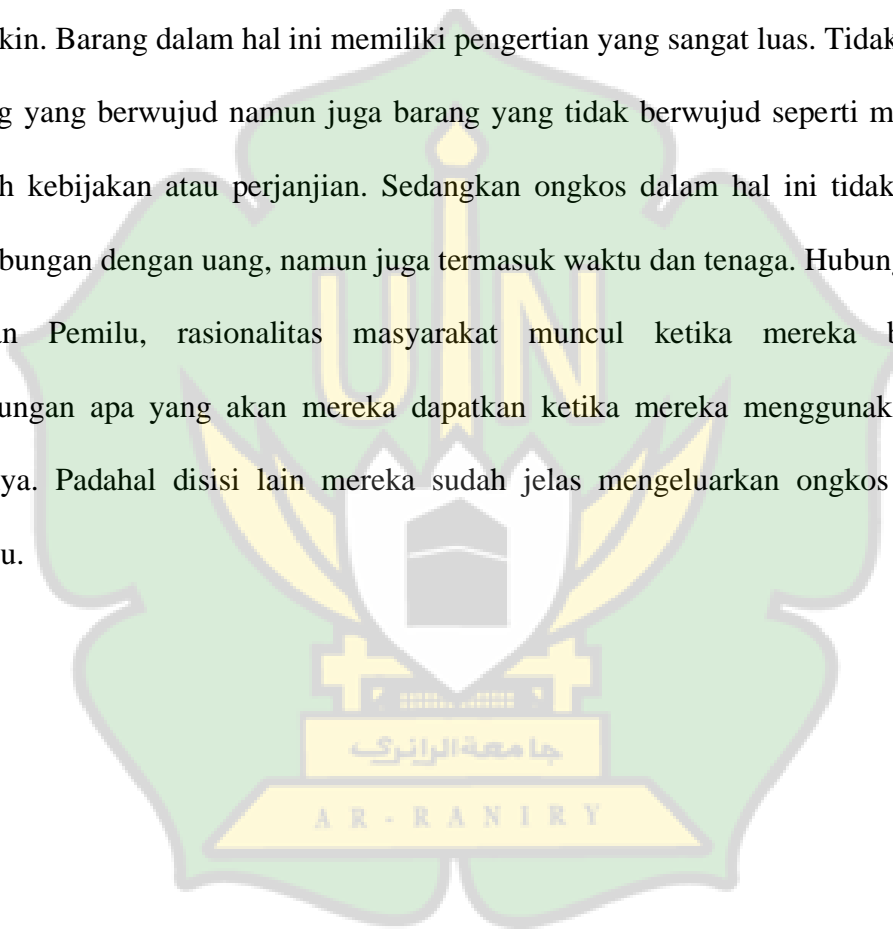
kesejahteraan pribadi. Motivasi intrinsik mengarah pada pembentukan pola perilaku yang dapat diperkuat melalui penggunaan teknologi digital. Tesis penguatan dan komplementaritas menunjukkan motivasi intrinsik adalah pendorong utama perilaku, tetapi penelitian sering menemukan hasil yang beragam khususnya ketika mempelajari perilaku yang difasilitasi oleh teknologi digital. Motivasi Ekstrinsik Motivasi ekstrinsik menunjukkan bahwa orang pada kenyataannya memiliki tingkat kebebasan memilih yang lebih rendah.²⁰

2.2.4. Partisipasi Perempuan dalam Politik

Partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia merupakan salah satu cerminan dari adanya keadilan di dalam demokrasi yang sekarang sedang berusaha diwujudkan di dalam masa transisi. Aspek partisipasi perempuan di dalam demokrasi bukanlah sesuatu yang datang dengan tiba-tiba melainkan memerlukan kesadaran dan kepedulian dari seluruh masyarakat kita. Namun sayangnya kondisi partisipasi perempuan di panggung politik masih sangat rendah, dimana sistem politik di Indonesia masih didominasi oleh kaum laki-laki sehingga dengan sendirinya bila diberlakukan kondisi alamiah, maka panggung politik tetap akan didominasi secara mayoritas oleh kaum laki-laki. Masyarakat dalam Partisipasi Politik Sosialisasi dan pendidikan politik yang diberikan oleh lembaga sosial dalam meningkatkan partisipasi politik ternyata tidak lantas mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi politik secara maksimal. Sehingga dalam hal ini peneliti melihat dari sisi lain mengenai pengaruh rasionalitas pemilih dalam partisipasi politik.

²⁰ Ibid

Terlepas dari pemahaman manusia sebagai makhluk sosial, pada dasarnya manusia merupakan makhluk individu. Makhluk individu memiliki tingkat rasionalitas yang sangat tinggi. Sifat dasar dari makhluk rasional adalah kalkulasi untung rugi yang menjadi dasar setiap tindakannya. Hampir semua manusia akan berusaha mendapatkan barang yang dia inginkan dengan ongkos seminimal mungkin. Barang dalam hal ini memiliki pengertian yang sangat luas. Tidak hanya barang yang berwujud namun juga barang yang tidak berwujud seperti misalnya sebuah kebijakan atau perjanjian. Sedangkan ongkos dalam hal ini tidak selalu berhubungan dengan uang, namun juga termasuk waktu dan tenaga. Hubungannya dengan Pemilu, rasionalitas masyarakat muncul ketika mereka berfikir keuntungan apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka menggunakan hak pilihnya. Padahal disisi lain mereka sudah jelas mengeluarkan ongkos dalam Pemilu.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui Motivasi calon legislatif perempuan dalam kontestasi pemilu 2019 di Abdya. Studi kasus penanganan masalah sanitasi yang layak di Gampong Jawa. Maka peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif. Dengan menggunakan metode ini diharapkan agar penelitian yang dilakukan dapat tepat sasaran. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.²¹ Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian melihat Motivasi calon legislatif perempuan dalam kontestasi pemilu 2019 di Kabupaten Aceh Barat Daya

3.3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk lebih mempersempit ruang penelitian dalam pembahasan, sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang dikaji sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.11

3.4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan Sumber data penelitian ini adalah :

- Data primer ,yakni dimana data penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Di dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui obeservasi, wawancara langsung dengan informan.
- Data sekunder, yakni data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui laporan advokasi pemberitaan media massa, atau dihasilkan dari pihak lain atau digunakan oleh lembaga lainya yang bukan merupakan pengelolanya namun dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder dalam penelitian juga didapatkan dari situs-situs institusi yang resmi yang dapat menjadikan suatu referensi berdasarkan kajian penelitian ini, selain itu juga dari referensi buku, jurnal, ebook dan artikel yang terkait dengan pembahasan penelitian motivasi calon legislatif perempuan dalam kontestasi pemilu 2019 di Abdy..

3.5. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	DPRK perempuan yang terpilih 2019	1
2	Masyarakat Perempuan yang ikut mencalonkan diri pada pileg 2019	3
3	Masyarakat Abdy	2
4	Tokoh Perempuan atau Aktivist Perempuan	2

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²² Teknik pengumpulan data merupakan teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti dalam usaha mengumpulkan data dari lapangan. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya, karena observasi tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang, maka metode ini dilakukan pada awal penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan permasalahan yang diteliti untuk dijadikan pedoman, petunjuk dan arah dalam melakukan penelitian.²³ Teknik pengumpulan data dengan cara observasi merupakan pengamatan peneliti untuk memperbanyak hasil temuan yang tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang tetapi juga terhadap objek alam lainnya, agar peneliti

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.308

²³ Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*, hal.165

lebih mengenal situasi dan dapat mengumpulkan keterangan yang lebih banyak.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu, yaitu adanya pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan).²⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, notulen rapat, agenda dan lain-lain, dengan metode dokumentasi memiliki keunggulan dari segi efisien waktu dan tenaga.²⁵

3.7. Teknik Analisis Data

- Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih dan memilah data mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dapat berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai dengan akhir. Fungsi reduksi

²⁴Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2018. hal.23,

²⁵Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya*, Jakarta: Kencana, 2013. hal.100,

data ialah menggolongkan, mengarahkan, menajamkan dan membuang yang tidak penting serta mengorganisasikan sehingga interpretasi bias ditarik.

- Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap kedua setelah melakukan reduksi data, yakni menyajikan data dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan atau bagan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan membaca data dan menarik kesimpulan. Penyajian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi satu atau beberapa kategori dan dilakukan secara sistematis.

- Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap lanjutan dari penyajian data, yakni menarik kesimpulan yang dilakukan selama dalam proses penelitian. Akan tetapi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung penelitian tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat penelitian dilakukan dilapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.²⁶

²⁶ Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2018 hal.23,

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perempuan di Abdya

Kabupaten Aceh Barat Daya adalah salah satu dari 23 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah administrasi Provinsi Aceh. Berikut penjelasan umum tentang Abdya:

Jumlah Penduduk

Berikut disajikan data kependudukan Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Aceh Barat Daya Menurut Jenis Kelamin

Kecamatan	Jumlah Penduduk Aceh Barat Daya Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)								
	Laki-Laki			Perempuan			Total		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Manggeng	7 007	7 838	7 963	7 262	7 493	7 576	14 269	15 331	15 539
Lembah Sabil	5 392	5 581	5 628	5 609	5 540	5 577	11 001	11 121	11 205
Tangan Tangan	6 153	6 942	7 038	6 423	6 762	6 830	12 576	13 704	13 868
Setia	5 409	4 428	4 467	5 261	4 245	4 290	10 670	8 673	8 757
Blangpidie	11 882	11 884	12 011	12 081	11 926	12 074	23 963	23 810	24 085
Jeumpa	5 426	5 712	5 785	5 543	5 626	5 694	10 969	11 338	11 479
Susoh	11 653	12 372	12 500	11 776	12 247	12 388	23 429	24 619	24 888
Kuala Batee	10 616	10 812	10 955	10 709	10 571	10 710	21 325	21 383	21 665
Babahrot	11 285	10 685	10 873	10 906	10 111	10 298	22 191	20 796	21 171
Aceh Barat Daya	74 823	76 254	77 220	75 570	74 521	75 437	150 393	150 775	152 657

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat Daya

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2019 sebanyak 74.823 jiwa, mengalami kenaikan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 76.254 jiwa, dan pada tahun 2021 sebanyak 77.220 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk perempuan pada tahun 2019 sebanyak 75.570 jiwa, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 sebanyak 74.521 jiwa dan melonjak kembali pada tahun 2021 sebanyak 75.437 jiwa. Data tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Abdyā.

Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan peningkatan kesejahteraan yang berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi dan demografi yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan juga merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Berikut data Angka Partisipasi Murni Sekolah Kabupaten Aceh Barat Daya:

Tabel 4.2

Angka Partisipasi Murni Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya

Kabupaten	Angka Partisipasi Murni Perempuan								
	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA		
	2015	2016	2021	2015	2016	2021	2015	2016	2021
Aceh Barat Daya	97,10	94,71	98,90	94,40	83,60	75,56	73,00	73,04	77,33

Kabupaten	Angka Partisipasi Murni Laki-Laki								
	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA		
	2015	2016	2021	2015	2016	2021	2015	2016	2021
Aceh Barat Daya	96,60	99,36	100,00	85,90	81,62	85,99	64,90	77,68	70,11

Kabupaten	Angka Partisipasi Murni Perempuan		
	S1	S2	S3
	Aceh Barat Daya	2021 3.96%	2021 0.06%

Kabupaten	Angka Partisipasi Murni Laki Laki		
	S1	S2	S3
	Aceh Barat Daya	2021 4.86%	2021 0.09%

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat Daya

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa partisipasi perempuan pada tahun 2021 di tingkat SD/MI pada tahun 2021 sebanyak 98,90, SMP/MTs sebanyak 75,56% dan, pada tingkat SMA sebanyak 77,33%. Sedangkan untuk laki-laki pada tahun 2021 di tingkat SD/MI sebanyak 100,00% tingkat SMP/MTs sebanyak 79,11%, dan, pada tingkat SMA/MA sebanyak 79,11%. Dari tingkat SD sampai dengan SMA terlihat bahwa terdapat perbedaan presentasi tingkat partisipasi Pendidikan antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki memiliki tingkat partisipasi yang lebih besar dari perempuan.

Begitu pula di level pendidikan lanjutan. Jumlah perempuan yang menyelesaikan S1 sebesar 3.96% dan S2/S3 0.06%. Sedangkan laki-laki yang

menamatkan S1 sebanyak 4,84%, S2 sebanyak 0,09% dn S3 sebanyak 0,06%. Data tersebut menggambarkan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam Pendidikan di level tersebut lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Tingkat Pekerjaan

Tingkat pekerjaan menjadi salah satu tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Berikut data tingkat pekerjaan masyarakat Kabupaten Abdya.

Tabel 4.3

Pekerjaan Masyarakat Kabupaten Abdya

No	Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1	PNS	1.255	1.990
2	Petani	5.760	1.280
3	Nelayan	1.233	0
4	IRT	0	8.560
5	Pedagang	1.200	786
6	Lainnya/Wiraswasta	14.800	5.800

Sumber data: <http://www.profilabdya.go.id>

Tabel di atas menjelaskan data yang menarik, dimana terdapat posisi perempuan bekerja lebih banyak dari pada laki-laki, terutama memiliki profesi sebagai PNS. Namun pada profesi lainnya, perempuan yang bekerja lebih sedikit dari laki-laki. Hal ini menjelaskan bahwa perempuan tidak memegang control ekonomi di rumah tangga, dimana mereka memiliki sumber daya ekonomi yang minim.

Keterwakilan Perempuan di Jabatan Publik

1. Eksekutif

Menurut BPS Persentase perempuan sebagai kepala desa dan jabatan kepala dinas meningkat menjadi 4,9% pada 2020 yang pada tahun 2016 sebesar 4,82%.

2. Legislative

Pada parlemen merujuk pada pemilu 2019 silam keterwakilan perempuan di DPRK masih sangat rendah. Hanya 1 orang perempuan yang berhasil menduduki kursi di parlemen. Hal ini tidak ada perbedaan pada pemilu 2014 dimana hanya 1 orang saja yang memenangkan kursi DPRK Abdy.

3. Yudikatif

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, persentase hakim perempuan Kabupaten Abdy masih di bawah 30%. Pada 2020, persentase hakim perempuan sebesar 28,27%, naik 1,58 poin dari tahun 2016 yang sebesar 26,69%.

Tabel 4.4.

Data pilah Pemilih di Kabupaten Abdy

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki Memilih	Perempuan Memilih	Jumlah Wajib Memilih
1	Blangpidie	8.137	8.607	16.744
2	Tangan-Tangan	5.047	4.916	9.963
3	Manggeng	5.559	5.491	11.050
4	Susoh	8.756	8.989	17.745
5	Kuala Batee	7.683	7.806	15.489
6	Babahrot	7.404	7.084	14.488
7	Setia	3.119	3.087	6.206
8	Jeumpa	4.045	4.068	8.113
9	Lembah Sabil	4.013	4.097	8.110
Jumlah		53.763	54.145	107.908

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat Daya

Berdasarkan data yang disajikan di atas dapat dilihat bahwa jumlah pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan pemilih laki-laki dimana jumlah pemilih perempuan sebanyak 54.145 suara dan laki-laki sebanyak 53.763 suara.

4.2. Motivasi Keterlibatan Perempuan Terhadap Daya Kompetisi Pada Pemilu

Bagian ini menjelaskan terdapat keterkaitan antara motivasi keterlibatan perempuan terhadap daya kompetisi pada pemilu. Di tengah perdebatan tentang keterlibatan perempuan dalam politik beserta dengan kesulitan memenuhi representasi 30%, penelitian ini mencoba menggali potensi-potensi diri dan lingkungan yang mempengaruhi daya kompetisi masing-masing politisi perempuan pada pemilu.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat 2 motivasi politisi perempuan untuk terlibat sebagai kontestan pemilu 2019, yaitu:

1. Tuntutan dari partai karena sudah menjadi kader

Sehubungan dengan kaderisasi anggota perempuan dalam partai politik, maka dapat dikatakan bahwa kaderisasi merupakan proses seleksi yang dilakukan partai untuk melatih dan mempersiapkan para anggota perempuan untuk menjadi calon wakil rakyat dan calon pemimpin. Di Kabupaten Abuya, proses kaderisasi anggota parpol perempuan itu sendiri dimaksudkan untuk mewujudkan keterwakilan perempuan pada setiap pemilu legislatif khususnya pemilu tahun 2019 sehingga lahirlah wakil-wakil rakyat dan pemimpin masyarakat dari kalangan perempuan.

Namun bergabungnya perempuan sebagai kader partai digunakan oleh partai untuk memenuhi kuota perempuan dalam pertarungan politik. Hal ini menambah beban baru kepada perempuan yang mana perempuan dipaksa untuk terlibat dalam pemilu 2019 silam. Hal ini juga dipertegas oleh aktivis perempuan dalam wawancaranya:

Kebanyakan partai memanfaatkan kader perempuan mereka untuk pemenuhan kuota perempuan di partai. Seperti pemilu kemarin kebanyakan perempuan yang ikut pemilu itu berasal dari kader mereka. Jadi semacam ada tuntutan dari partai untuk kader agar terlibat dalam pemilu secara langsung. Kalau sudah jadi kader maka apabila ditunjuk dan diajak harus bersedia ikut.²⁷

²⁷ Wawancara dengan Irawati aktivis perempuan Abuya pada tanggal 12 Juli 2022 di Kabupaten Aceh Barat Daya

Selain itu dari hasil wawancara dalam hal keikutsertaan kaum perempuan dalam kepengurusan parpol maupun penentuan calon legislatif beberapa caleg perempuan menyatakan bahwa mereka mau diajak terlibat dalam pemilu karena partai politik menunjukkan bahwa proses kandidasi di internal partai terbilang cukup mudah. Hal ini disebabkan karena usaha partai politik dalam rangka pemenuhan kuota keterwakilan 30% perempuan dalam jajaran kepengurusan partai maupun dalam penentuan calon legislatif.

Kenapa mau diajak masuk partai dan ikut pemilu ya karena syarat masuknya itu ga ribet. Apalagi kan sudah ada kuota khusus untuk perempuan, jadi punya kesempatan besar untuk ikut terlibat. Mungkin kalau syaratnya ribet malas juga terlibat. Syaratnya ga banyak cukup kasi KTP nanti mereka yang urus.²⁸

Kemudian stigma bahwa perempuan memang secara kodrati berada dalam lingkungan domestik (rumah tangga) secara tidak langsung menjadi kendala bagi perempuan itu sendiri untuk terjun di dunia politik. Sebaliknya, seharusnya hal ini dapat dijadikan keuntungan bagi calon legislatif perempuan yang ingin berkontestasi dalam pemilu legislatif. Sebab dengan demikian persaingan di tingkat partai akan semakin mudah, dan karena pilihan juga akan semakin mengerucut. Kemudahan persyaratan untuk menjadi calon legislatif tidak dibarengi

²⁸ Wawancara dengan Ismiati caleg perempuan, pada tanggal 16 Juli 2022 di Kabupaten Aceh Barat Daya

dengan pendidikan politik kepada kader-kader perempuan. Sehingga pada saat nantinya caleg perempuan ini akan bertarung di pemilu legislatif, caleg perempuan ini akan mendapatkan dukungan suara dari rakyat. Hal tersebut didukung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kuota 30% perempuan, sehingga calon yang muncul hanya sekedar pelengkap saja.

2. Memperjuangkan kepentingan perempuan

Jika dibandingkan dengan motivasi yang pertama menurut analisis penulis dilihat bahwa lebih besar motivasi yang pertama karena rata-rata caleg perempuan berasal dari kalangan ibu rumah tangga yang notabene berpolitik karena diajak oleh partai.

Nasib masyarakat perempuan akan sejahtera jika perempuan peduli dan sadar akan kepentingan mereka. Oleh karena itu perempuan harus terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini dikarenakan hanya perempuan yang paham akan kemauan perempuan. Maka dari itu beberapa caleg perempuan setuju bahwa mereka ikut serta dalam pemilu 2019 bahwa mereka ingin menjadi wadah atau tempat dalam menyalurkan aspirasi perempuan. Perempuan beranggapan bahwa caleg laki-laki yang menduduki kursi DPRK belum mampu menjadi pendengar yang baik bagi masyarakat perempuan, banyak aspirasi perempuan yang tidak tersampaikan dan tidak terealisasikan. Seperti melihat kondisi perempuan yang tidak sejahtera secara ekonomi, banyak kebijakan yang mementingkan laki-laki sedangkan pembangunan yang

mendukung perempuan tidak dihiraukan seperti pembangunan posyandu dan dana dana yang disalurkan lebih kepada laki-laki. Oleh karena itu perempuan-perempuan tersebut ingin menyalonkan diri sebagai caleg perempuan untuk mengubah hal-hal tersebut. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

*Caleg laki-laki belum mampu menjadi wadah penyampai aspirasi perempuan, banyak sekali yang diinginkan oleh masyarakat perempuan tapi tidak direalisasikan. Jadi kami mau merubah dan menjadi wadah yang benar-benar mampu menjadi tempat penampung aspirasi masyarakat perempuan. Karena itulah kami harus terlibat langsung dalam pemilu yang dilaksanakan kemarin, alasannya untuk mencapai tujuan-tujuan kami masyarakat perempuan yang tidak tersampaikan selama ini, seperti pemberdayaan perempuan, pemberdayaan ekonomi perempuan dan bantuan-bantuan untuk masyarakat perempuan. Kami ingin mewujudkan hal-hal itu. Ekonomi masyarakat perempuan belum sejahtera, pembangunan yang tidak pro perempuan seperti penganggaran dana banyak ke pembangunan-pembangunan yang berpihak ke laki-laki, misal pembangunan balai perempuan selalu tertunda, dana operasional PKK juga minim.*²⁹

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa caleg perempuan yang ikut serta dalam pemilu 2019 di kabupaten Abdyia merasa tidak puas dengan caleg laki-laki yang enggan peduli dengan nasib perempuan, hal ini menggerakkan mereka untuk merubah kondisi tersebut dengan terlibat langsung sebagai caleg perempuan.

²⁹ Wawancara dengan Ismiati caleg perempuan, pada tanggal 16 Juli 2022 di Kabupaten Aceh Barat Daya

Lebih lanjut para caleg perempuan tersebut juga menyampaikan bahwa alasan lain mencalonkan diri sebagai caleg perempuan di Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2019-2024 didasari oleh perasaan simpati kepada masyarakat kecil atau miskin dan perasaan prihatin terhadap kaum perempuan serta anak-anak. Sehingga muncul keinginan dalam diri politisi perempuan untuk membantu masyarakat tersebut melalui jalan politik.

Kalau ditanya alasan mau ikut maju sebagai caleg perempuan itu saya priadi merasa prihatin dengan kondisi perempuan yang miskin dan kondisi anak-anak di Abdya khususnya, banyak perempuan itu terpinggirkan hak-hak mereka tidak terpenuhi yang kemudian menggerakkan saya dan beberapa teman-teman untuk ikut terlibat langsung dalam politik, karena menurut saya dengan terlibat langsung dalam dunia politik akan membantu secara politik akan lebih berpengaruh kepada mereka, bisa dibantu melalui program-program atau bantuan-bantuan yang dapat disalurkan sesuai kebutuhan mereka.³⁰

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa caleg perempuan sadar akan nasib perempuan di kabupaten Abdya yang tidak sejahtera. Hal tersebut menjadi faktor pendorong perempuan ikut terlibat dalam pemilihan pemilu yang diselenggarakan tersebut.

Setelah mengetahui motivasi caleg perempuan terlibat menjadi peserta

³⁰ Wawancara dengan Maria Ulva caleg perempuan, pada tanggal 15 Juli 2022 di Kabupaten Aceh Barat Daya

pemilu, maka berikut agen yang mendorong terbentuknya motivasi politik caleg perempuan tersebut:

1. Partai Politik

Dengan adanya caleg perempuan parpol juga dimudahkan untuk ikut terlibat dalam pemilu, perempuan diajak dan diberi dorongan untuk memenuhi kuota 30%, seperti pengalaman salah satu caleg perempuan ketika mengikuti pemilu, perempuan-perempuan yang ingin terjun ke dunia politik sangat didukung, ia menyampaikan :

Partai mulai memprioritaskan perempuan, maksudnya begini semua dapil itu memang harus ada caleg perempuan nya dan yang priotitas ini harus serius, kalau ga serius tidak usah ikut. Intinya untuk mendongkrak suara saja. Kalau memang dia itu caleg potensial dalam artian ditarget untuk bisa mewakili di dapil tersebut, ya dia harus bekerja keras harus punya tim dan kerjasama.³¹

Dari wawancara diatas, dapat diketahui bahwa dukungan partai dalam hal rekrutmen caleg perempuan sangat terbuka, bagi caleg perempuan yang serius dituntut berusaha keras dan mengeluarkan modal, namun, sayangnya disisi lain sebagian caleg perempuan digunakan untuk mendongkrak suara saja, hal tersebut disadari atau tidak telah menjadikan caleg perempuan sebagai pelengkap atau subordinat, untuk melengkapi formasi caleg disebabkan peraturan tentang kuota 30% perempuan dan untuk mendongkrak suara.

Pemilihan Umum Anggota Legislatif Kabupaten Aceh Barat Daya

³¹ Wawancara dengan Ismiati caleg perempuan, pada tanggal 16 Juli 2022 di Kabupaten Aceh Barat Daya

Periode 2019-2024, kuota gender menjadi syarat mutlak yang harus diperhatikan oleh partai politik ketika mencalonkan diri sebagai peserta pemilu. Setiap partai politik yang hendak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut wajib menyertakan Surat Keputusan Partai Politik yang menerangkan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politiknya. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh salah satu DPRK perempuan yang terpilih pada tahun 2019 dalam wawancaranya:

Perempuan ikut mencalonkan diri sebagai caleg pada pemilu kemarin itu diawali dengan untuk pemenuhan kuota perempuan, ini diajak langsung oleh partai-partai supaya kuota mereka terpenuhi dan dapat berkompetisi di pemilu. Dari jumlah 15 partai yang mendaftar itu ada 378 calon didalamnya ada sekitar 136 caleg perempuan.³²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa perempuan ikut mencalonkan diri salah satunya dipengaruhi oleh keharusan partai politik dalam memenuhi kuota perempuan yang diwajibkan kepada setiap partai politik. Hal ini kemudian mengharuskan partai politik mencari perempuan-perempuan tersebut untuk ikut terlibat dalam kontestasi pemilu sebagai caleg perempuan.

Hal yang sama juga dipertegas oleh tokoh perempuan dan aktivis perempuan Abdyah bahwa keikutsertaan caleg perempuan dalam kontestasi pemilu tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya peraturan

³² Wawancara dengan Desi caleg perempuan DPRK Abdyah terpilih 2019-2024 pada tanggal 18 Juli 2022 di Kabupaten Aceh Barat Daya.

kuota 30 persen keterlibatan perempuan, oleh karena itu partai politik banyak mengajak perempuan untuk memenuhi kuota tersebut. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

Sebenarnya banyaknya perempuan yang mendaftar sebagai caleg pada pemilu kemarin itu karena diajak sama partai, partai mengajak perempuan tidak lain hanya untuk memenuhi kuota perempuan saja, kan untuk mendaftar pemilu partai politik harus mempunyai caleg perempuan sebanyak 30 persen, jadi dengan begitu para partai politik mencarilah perempuan-perempuan tersebut untuk diajak ikut serta dalam pemilihan tidak lebih dari itu saya rasa.³³

Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa caleg perempuan tersebut hanya digunakan untuk kepentingan partai dalam mendaftar kompetisi pemilu. Caleg perempuan hanya digunakan untuk memenuhi kuota perempuan saja.

Selain itu, untuk mendapatkan calon legislatif perempuan di daerah, Partai politik menghimbau dan mengajak pengurus perempuan yang ada di daerah tersebut untuk mengikuti rekrutmen calon legislatif 2019. Setiap partai politik sudah memiliki pengurus partai perempuan. Namun, perlu ditekankan bahwa dengan himbuan partai terhadap perempuan untuk maju menjadi calon legislatif, para bakal calon legislatif tersebut juga harus tetap mengikuti regulasi pencalegan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu caleg perempuan dalam wawancaranya:

³³ Wawancara dengan Irawati aktivis perempuan Abdy pada tanggal 12 Juli 2022 di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Sebenarnya setiap parpol itu mereka sudah ada kader perempuannya, jadi partai politik hanya tinggal menunjuk siapa yang akan ikut dalam pemilu tersebut. Sebelum ditunjuk biasanya akan dipanggil terlebih dahulu, ditawarkanlah istilahnya diajak untuk ikut dalam pemilu seperti saya kemarin saya harus mengikuti pemilihan DPRK karena menurut mereka saya punya peluang karena saya aktif dimasyarakat jadi diajak untuk ikut rekrutmen pemilihan.³⁴

Berdasarkan penuturan di atas dapat dilihat bahwa setiap parpol sudah memiliki kader perempuan. Sehingga tidak perlu lagi mencari perempuan yang diluar partai. Perempuan diajak untuk ikut terlibat dalam pemilu karena partai melihat potensi caleg perempuan tersebut. Perempuan yang ditawarkan biasanya merupakan perempuan yang aktif dalam masyarakat seperti aktivis perempuan. Karena mempunyai peluang lebih besar untuk dipilih oleh masyarakat.

Namun terkadang kader perempuan juga ada yang tidak berminat untuk ikut terlibat langsung dalam politik maka partai akan meminta kader tersebut untuk mendapatkan caleg perempuan yaitu dengan menjemput peserta perempuan di lapangan dengan ini diharapkan dapat meyakinkan calon peserta untuk mau terjun dan menjadi caleg. Parpol menilai hubungan antara personal, yaitu antara pengurus partai dan masyarakat akan mempermudah meyakinkan dan membawa lebih banyak bakal calon legislatif perempuan. Karena, dengan interaksi

³⁴ Wawancara dengan Irmawati caleg perempuan, pada tanggal 16 Juli 2022 di Kabupaten Aceh Barat Daya

personal, permasalahan atau hambatan yang dimiliki calon peserta dapat dikomunikasikan dengan parpol, dan parpol akan berusaha untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Akan tetapi dengan cara mendatangi satu persatu bakal caleg tersebut tidak menjamin bahwa mereka akan dipastikan lolos menjadi caleg, mereka akan tetap mengikuti regulasi yang berlaku, sehingga standar kualitas caleg akan tetap terjaga. Hal ini disampaikan oleh caleg perempuan dalam wawancaranya:

Kalau kader tidak mau terlibat langsung maka parpol akan meminta kader untuk turun ke komunitas-komunitas perempuan untuk menjemput peserta langsung, karena komunitas perempuan sudah pasti mendukung perempuan. Dengan demikian mereka akan lebih mudah teryakinkan, mereka bisa tanya apa keraguannya, apa yang jadi masalah, kekurangannya dimana, pada akhirnya kan bisa face to face discussion, tidak hanya dari media, karena banyak yang kami temui banyak yang tertarik, namun ragu nanti gimana ya, nanti sulitnya gimana, soalnya kitakan perempuan, soalnya selama ini harus mengurus perempuan, dsb. Sebenarnya itukan hal-hal yang sebenarnya kita memberikan semacam advokasi kepada mereka, setelah pertanyaan-pertanyaan yang ada dibenak mereka itu sudah terjawab, berikutnya tinggal bagaimana kita menilai kompetensi mereka, jangan sampai kita memberikan prioritas tapi di satu sisi kompetensi juga diperlukan gitu.³⁵

³⁵ Wawancara dengan Ismiati caleg perempuan, pada tanggal 16 Juli 2022 di Kabupaten Aceh Barat Daya

Meskipun dengan upaya menjemput kandidat yang dilakukan oleh Parpol tidak selalu berjalan sukses, namun parpol tetap menggunakan pengurus-pengurus partainya untuk tetap proaktif mendapatkan bakal calon legislatif di lapangan.

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa partai politik memiliki masalah dalam hal kaderisasi. Terbukti dengan begitu banyak keraguan perempuan untuk terlibat dalam partai politik. Keraguan tersebut juga dibentuk oleh budaya di masyarakat, dimana memberi jarak antara perempuan dan peran sosialnya di masyarakat.

2. Keluarga

Kemudian caleg perempuan yang terpilih juga menyampaikan bahwa pada pemilihan umum anggota legislatif Kabupaten Abdy periode 2019-2024, banyak caleg perempuan yang sepenuhnya memperoleh dukungan dari lingkungan keluarga, terutama dari orang tua. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

Beberapa perempuan yang ikut berpartisipasi itu mendapat dukungan dari keluarga, seperti yang utama dapat izin dari suami dan keluarga besar. Saya sendiri ikut berpartisipasi juga karena dorongan keluarga, orang tua juga tokoh masyarakat jadi keluarga sangat mendukung untuk ikut terlibat dalam politik.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan sebagai caleg pada pemilu kabupaten Abdy

sangat dimotivasi oleh dukungan keluarga terutama orang tua caleg perempuan tersebut yang merupakan salah satu tokoh perempuan. Sehingga dengan dukungan tersebut membantu perempuan optimis dalam berkompetisi.

Salah satu aktivis perempuan setuju bahwa dukungan keluarga dan lingkungan sekitar memotivasi perempuan untuk ikut terlibat dalam politik. Selain karena ada ajakan dari partai mendapat dukungan dan diajak keluarga dan masyarakat sekitar juga membuat caleg perempuan optimis memenangkan kompetisi pemilu tersebut. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

Motivasi banyaknya caleg perempuan ini selain karena adanya ajakan dari partai juga sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar, mereka menjadi yakin bahwa akan memperoleh kemenangan secara masyarakat disekitar mereka pasti akan memilih mereka kan, dengan adanya dukungan keluarga juga akan memudahkan caleg perempuan ikut terlibat yang utama itu dukungan suami, kalau suami ga dukungkan repot jadinya.³⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa yang membentuk motivasi caleg perempuan ikut terlibat dipengaruhi oleh dukungan keluarga dan dukungan lingkungan sekitar sehingga menjadikan caleg perempuan optimis untuk menang.

³⁶ Wawancara dengan Irawati aktivis perempuan Abdy pada tanggal 12 Juli 2022 di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Perempuan yang berasal dari keluarga tokoh masyarakat mendapatkan dukungan penuh dari keluarga tersebut. Hal ini dikarenakan mereka meyakini anggota keluarga mereka akan memenagkan kontestasi pemilu tersebut, disebabkan pengaruh orang tua dikalangan masyarakat yang sudah dikenalama dan dihormati oleh masyarakat.

Selain itu tokoh perempuan juga mengungkapkan bahwa pentingnya keterlibatan perempuan di dalam politik, karena selain untuk menambah wawasan perempuan juga untuk untuk membuat keputusan dan kebijakan yang diwacanakan bisa mewakili perempuan lain karena para perempuan berpikir lelaki kurang mewakili apa yang perempuan inginkan. Selain itu hanya perempuan yang memahami perempuan. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

Perempuan harus tau bahwa keterlibatan mereka dalam politik itu sangat penting, karena hanya perempuan yang paham perempuan, banyak kebijakan yang tidak pro perempuan kalau hanya laki-laki yang menduduki kusi jabatan pemerintahan baik eksekutif maupun legislative, jadi perempuan harus ikut terlibat agar dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang pro perempuan. Karena hanya perempuan yang mampu memahami apa yang diinginkan oleh perempuan.³⁷

³⁷ Wawancara dengan Irawati aktivis perempuan Abdya pada tanggal 12 Juli 2022 di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Hasil wawancara di atas memperlihatkan bahwa penting bagi perempuan untuk memahami keterlibatan mereka dalam politik. Karena hanya perempuan yang dapat mengerti kebutuhan perempuan yang nantinya dapat dituangkan dalam bentuk kebijakan yang pro perempuan.

3. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat merupakan orang yang dipandang dan dihormati dikalangan masyarakat. Maka akan sangat penting mendapat dukungan dari tokoh masyarakat. Untuk mendapat suara dan dukungan dari masyarakat, perlu terlebih dahulu mendapat dukungan dari tokoh masyarakat. Oleh karena itu kandidat perempuan yang didukung oleh tokoh masyarakat akan mendapat dukungan juga dari masyarakat. Seperti salah satu kandidat caleg perempuan yang menang dalam pemilu 2019 silam. Kandidat tersebut didukung oleh tokoh masyarakat dan diajak untuk terlibat dalam pemilu. Hal ini disampaikan oleh caleg perempuan dalam wawancaranya:

Selain dukungan dari keluarga dukungan dari tokoh masyarakat itu menurut saya sangat penting. Karena tokoh masyarakat ini kan orang yang dihormati di masyarakat, pasti akan berpengaruhlah. Saya pribadi kemarin memang diajak untuk terjun dalam pemilihan DPRK Abdya. Didukung penuh lah sampai akhirnya saya menang. Didukungnya itu dengan cara mengenalkan saya sebagai kandidat perempuan yang berpotensi. Kebetulan orang tua saya juga salah

*satu tokoh masyarakat.*³⁸

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa tokoh masyarakat menjadi salah satu faktor pendorong motivasi caleg perempuan. Hal ini dikarenakan caleg perempuan percaya bahwa mendapat dukungan tokoh masyarakat sama dengan mendapat dukungan masyarakat. Ini disebabkan karena tokoh masyarakat merupakan orang yang dipandang di masyarakat.

Motivasi yang terbentuk juga tidak terlepas dari latar belakang perempuan itu sendiri. Berikut adalah latar belakang dari caleg perempuan yang terlibat pada pemilu 2019 di Kabupaten Abdy:

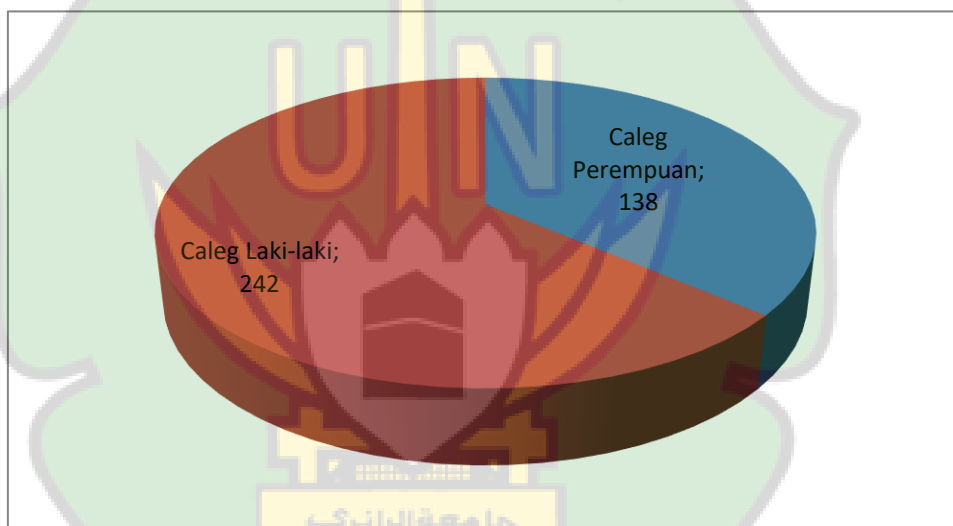
1. Ibu Rumah Tangga

Pada pemilu legislative di Abdy, dari 15 partai politik, terdapat 378 calon legislative yang memperebutkan 25 kursi di DPRK Abdy pada pemilu 2019. Dari total tersebut terdiri dari 136 caleg yang notabene perempuan dan selebihnya adalah laki-laki. Dari 25 kursi yang diperebutkan, para caleg perempuan harus bersaing dengan sesama caleg perempuan dan caleg laki-laki untuk mendapatkan suara dari 107.908 pemilih.

Secara spesifik, Abdy terdiri dari 3 Dapil. Dapil 1 meliputi kecamatan Blang Pidie, Susoh dan Jeumpa, dapil 2 meliputi Kecamatan Setia, Tangan-tangan, Manggeng dan Lembah Sabil, dan dapil 3

³⁸ Wawancara dengan Ismiati caleg perempuan, pada tanggal 16 Juli 2022 di Kabupaten Aceh Barat Daya

meliputi Kecamatan Kuala Batee dan Babahrot. Untuk Dapil I berjumlah 102 orang, Dapil II berjumlah 149 orang dan Dapil III berjumlah 127 orang. Sebelumnya, jumlah Caleg sebanyak 379 orang, namun satu caleg dari partai Golkar mengundurkan diri karena sudah menjadi PNS sehingga tersisa 378 orang. Selain itu, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) keseluruhan berjumlah 344 TPS yang tersebar di 132 gampong dari 9 kecamatan di kabupaten Abdya.



Mayoritas caleg perempuan yang mencalonkan diri pada pemilu Abdya tahun 2019-2024 merupakan berasal dari latar belakang seorang ibu rumah tangga. berdasarkan data yang dihimpun dari 138 caleg perempuan diantaranya 115 orangnya berasal dari kalangan ibu rumah tangga.

Pernyataan di atas senada dengan yang disampaikan oleh caleg perempuan yang berlatar belakang ibu rumah tangga bahwa dalam

pemilu Abdya periode 2019-2024 banyak didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga. Hal ini dikarenakan ada dorongan dari keluarga, partai politik dan juga terutama mendapatkan izin dari suami. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

Banyak caleg perempuan itu dari ibu-ibu rumah tangga, orang biasa. Ikut dalam pemilu ini bukan karena apa apa tapi karena ada dukungan dari keluarga, ada ajakan dari partai dan pastinya di dukung oleh suami, mau bekerja sama dalam berkampanye dan menyiapkan program-program yang berkaitan dengan perempuan seperti program pemberdayaan ekonomi masyarakat, kami ibu-ibu kan ada usaha kecil kecilan di rumah, inginnya nanti ada modal kesitu.³⁹

1. Bisnis Woman

Dari beberapanya berlatar belakang sebagai perempuan yang berbisnis atau memiliki pekerjaan menjalankan toko, produk rumahan dan bisnis pakaian.

Banyak caleg kemarin itu dari kalangan ibu-ibu rumah tangga, tapi ada sebagian juga dari yang menjalankan bisnis, walaupun bukan bisnis besar seperti saya mengelola toko baju, ada produk rumahan juga seperti kue browis⁴⁰

³⁹ Wawancara dengan Ismiati caleg perempuan, pada tanggal 16 Juli 2022 di Kabupaten Aceh Barat Daya

⁴⁰ Wawancara dengan Irmawati caleg perempuan, pada tanggal 16 Juli 2022 di Kabupaten Aceh Barat Daya

2. Aktivist Sosial

Selain itu caleg perempuan juga berasal dari aktivis sosial yang memang peduli pada nasib masyarakat terutama nasib perempuan. Kebanyakan caleg perempuan yang berlatar belakang aktivis ini paham benar terkait perempuan dan politik. Mereka ikut terlibat dalam politik dikarenakan rasa simpati mereka terhadap perempuan-perempuan yang masih terpinggirkan dan tidak terpedulikan. Oleh karena hal tersebut mereka bersedia secara sukarela terjun dalam politik. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu caleg perempuan yang berlatar belakang aktivis perempuan dalam wawancaranya:

Latar belakang caleg itu beragam, ada dari kalangan ibu rumah tangga, pebisnis dan dari aktivis. Yang dari aktivis ini memang sudah paham benar terkait nasib masyarakat terutama perempuan, karena kami aktif sekali di organisasi keperempuanan, kalau di desa itu ada PKK. Jadi kami sudah cukup paham apa yang diperjuangkan, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, atau karena diajak oleh partai untuk pemenuhan kuota mereka, akan tetapi kami bergabung karena rasa prihatin terhadap nasib perempuan yang sering tidak dipedulikan, padahal perempuan juga punya hak untuk sejahtera. Namun kesejahteraan sering sekali hanya berpaku pada laki-laki.⁴¹

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa caleg yang berasal dari aktivis sosial terlibat dalam politik memang sudah paham akan apa yang sedang mereka perjuangkan.

⁴¹Wawancara dengan Maria Ulva caleg perempuan, pada tanggal 15 Juli 2022 di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pemahaman caleg perempuan atas relasi politik dan perempuan adalah sebagai berikut:

1. Keterlibatan perempuan adalah upaya merubah nasib perempuan yang terpinggirkan
2. Perempuan sebagai alat memperjuangkan kemenangan partai politik
3. Perempuan memandang untuk terlibat dalam politik harus mempunyai dana yang besar.

4.3. Tantangan Perempuan Dan Keterlibatan Dalam Pemilu Di Abdy

Salah satu bidang yang menjadi sorotan kurangnya peran perempuan adalah di bidang politik, sangat pentingnya peran perempuan dalam bidang politik dikarenakan dalam politiklah sesungguhnya kaum perempuan bisa memperjuangkan hak-hak yang belum mereka dapatkan dalam konteks bernegara. Dalam pemilu di Abdy ada beberapa hal yang menjadi tantangan bagi caleg perempuan diantaranya ialah:

1. Keluarga

Keluarga dapat menjadi pendukung dan juga dapat menjadi penghambat bagi setiap caleg. Ada keluarga yang mendukung dan ada keluarga yang tidak mendukung.

Hasil wawancara penulis selama penelitian, seluruh informan dengan pernyataan yang berbeda namun sepakat menyatakan bahwa pada pemilihan umum anggota legislatif Kabupaten Abdy periode

2019-2024, banyak caleg perempuan yang belum sepenuhnya memperoleh dukungan dari lingkungan keluarga. Sebagian besar disebabkan oleh adanya alasan bahwa perempuan memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengurus keluarga. Antara memilih keluarga ataupun pekerjaan politik, politisi perempuan tentunya lebih memilih untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga. Hal ini disampaikan oleh salah satu caleg perempuan dalam wawancaranya:

Banyak caleg perempuan yang mendaftarkan diri itu sebenarnya juga tidak mendapatkan dukungan dari keluarga besarnya, itu karena perempuan harus bekerja di rumah, rata-rata ibu rumah tangga jadi punya kewajiban untuk mengurus rumah, anak dan suami. Jadi perempuan itu berat tugasnya kalau terjun ke dunia politik, bingung mau milih yang mana, antara politik atau rumah tangga, susah bagi waktu. Pada akhirnya kebanyakan perempuan lebih memilih memprioritaskan keluarganya.⁴²

Keterangan di atas merupakan suatu hal yang wajar. Sulit bagi seorang politisi berstatus calon legislatif untuk membagi waktu antara mengurus keluarga atau melakukan pekerjaan. Disatu sisi mengurus keluarga adalah sebuah tanggung jawab, akan tetapi disisi lain pekerjaan politik juga merupakan suatu hal yang penting. Ketika seorang caleg memilih fokus terhadap tanggung jawab dalam keluarga, maka akan mempengaruhi peluang untuk dipilih dalam kegiatan pemilu legislatif

⁴² Wawancara dengan Maria Ulva caleg perempuan, pada tanggal 15 Juli 2022 di Kabupaten Aceh Barat Daya

tahun 2019. Sedangkan jika seorang caleg perempuan memilih fokus pada kegiatan-kegiatan pencalonan anggota DPRK Kabupaten Abdy, maka urusan rumah tangga akan terganggu. Hal tersebut dikarenakan seorang politisi terlebih calon legislatif menghabiskan banyak waktu dan biaya. Disisi lain caleg perempuan juga harus mengorbankan seluruh tenaga dan pikiran juga ikut terbuang demi memperoleh kesempatan menang dengan kemungkinan terpilih kecil. Hal ini pada akhirnya menimbulkan perasaan dilematis dalam diri caleg perempuan yang mengakibatkan berkurangnya motivasi perempuan untuk bertarung dalam ajang pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Abdy. Penjelasan ini senada dengan yang disampaikan oleh aktifis abdy dalam wawancaranya:

Perempuan itu dihadapkan dalam situasi yang sulit jika bekerja di luar rumah, ditakutkan kalau fokus pada politik maka urusan rumah terbengkalai, kalau fokus urusan rumah nanti akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan politik. Masalah waktu tersebut menimbulkan perasaan dilemma bagi perempuan.⁴³

2. Lingkungan

Demikian juga dengan lingkungan sekitar sepertinya perjuangan perempuan di Indonesia era demokrasi seperti sekarang ini terutama dalam bidang politik masih perlu upaya yang cukup keras terutama untuk kaum perempuan. Seorang perempuan untuk menjadi pemimpin atau berkarir di luar rumah misalnya berperan dalam

⁴³ Wawancara dengan Irawati aktivis perempuan Abdy pada tanggal 12 Juli 2022 di Kabupaten Aceh Barat Daya.

partai politik atau pemerintahan lebih banyak mendapat hambatan dibanding laki-laki, terutama sikap budaya masyarakat yang belum sepenuhnya menerima. Dengan demikian persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam kepemimpinan dan peranannya dalam kehidupan politik di negara kita perlu diupayakan, dalam artian partisipasi perempuan agar benar-benar dapat diperhitungkan keberadaannya. Kesejajaran antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu usaha yang tidak sia-sia apabila perempuan itu sendiri berusaha sesuai dengan kemampuannya, sehingga dengan kemampuannya yang sama maka akan sanggup bersaing di kehidupan dengan kaum laki-laki. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh aktivis perempuan dalam wawancaranya:

Masih sangat perlu mengupayakan keterlibatan perempuan, karena perempuan biasanya dipinggirkan karena dianggap tidak mampu, perempuan masih dianggap tabu terlibat dalam politik, belum lagi pandangan bahwa perempuan itu tugasnya mengurus rumah dan anak saja menjadi hal yang sulit untuk perempuan. Namun jika perempuan ingin dan berniat keluar dari lingkaran tersebut bukan berarti tidak bisa tentu saja bisa jika ada kemauan dari perempuan itu sendiri, hal ini juga harus di bantu oleh pemerintah seperti keharusan adanya anggota perempuan sehingga akan mendukung kehadiran perempuan dalam politik. Dan akan menyamaratakan hak perempuan dengan laki-laki. Hal hal seperti ini perlu diupayakan terus menerus.⁴⁴

⁴⁴ Wawancara dengan Irawati aktivis perempuan Abdy pada tanggal 12 Juli 2022 di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perlu adanya upaya dari perempuan untuk keluar dari ingkaran yang mengucilkan kehadiran perempuan dalam politik. Perempuan harus mampu dan berani dalam mengambil langkah. Sehingga perempuan mendapat hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam dunia politik.

Lebih lanjut caleg perempuan tersebut mengatakan bahwa sekalipun kehadiran kaum perempuan itu sendiri sama-sama dibutuhkan dalam dunia politik layaknya kaum laki-laki. Namun minimnya terpilihnya perempuan pada pemilu legislatif Kabupaten Abdyta tahun 2019 merupakan hasil dari adanya perbedaan kelas sosial antara laki-laki dan perempuan. Bahwasannya perbedaan sosial tersebut memunculkan pandangan-pandangan yang mengklasifikasikan kaum perempuan ke dalam golongan orang-orang lemah sehingga jumlah suara yang diberikan untuk kaum perempuan dalam pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2019 di kabupaten Abdyta tidak diprioritaskan. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

Sangat sedikit terpilihnya perempuan sangat dipengaruhi oleh kelas sosial yang dibangun oleh masyarakat, seperti perempuan masih dianggap kelompok lemah. Sehingga suara perempuan tidak menjadi prioritas masyarakat dalam memilih. Hal ini terbukti hanya 1 yang lolos dari sekian banyak yang mencalonkan diri.⁴⁵

⁴⁵ Wawancara dengan Desi caleg perempuan DPRK Abdyta terpilih 2019-2024 pada tanggal 18 Juli 2022 di Kabupaten Aceh Barat Daya.

3. Kekuatan Finansial

Selain itu kekuatan finansial juga menjadi salah satu kendala keterpilihan caleg perempuan dalam pemilu legislatif 2019 di kabupaten Abdya yang bias gender karena masyarakat menganggap perempuan kurang memiliki kekuatan finansial. Seperti yang diketahui bahwa semakin banyak para kandidat menginvestasikan modal sosial, budaya dan ekonomi maka semakin banyak modal politik yang diperoleh sebagai pintu masuk merebut kekuasaan. Berdasarkan UU No.10 pasal 129, setiap calon anggota DPR baik laki-laki maupun perempuan turut dalam pembiayaan dana kampanye atau sosialisasi politik termasuk di dalamnya dana iklan di media massa/media cetak serta pemasangan alat peraga (pamflet, spanduk, dll). Hal ini disampaikan oleh tokoh perempuan dalam wawancaranya:

Perempuan dianggap oleh masyarakat kurang dari segi uang karena kebanyakan perempuan yang mencalonkan diri berasal dari kalangan ibu rumah tangga yang keuangannya diandalkan dari suami atau keluarganya. Sehingga perempuan tidak dapat mengeluarkan uang banyak dalam berkampanye. Hal ini berdampak kepada suara yang diperoleh oleh caleg perempuan.⁴⁶

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa adanya keterbatasan dalam segi finansial caleg perempuan. Hal ini dikarenakan

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Rodhiah Tokoh Perempuan pada tanggal 20 Juli 2022 di Kabupaten Aceh Barat Daya

kebanyakan caleg perempuan berasal dari latar belakang sebagai seorang ibu rumah tangga yang keuangannya dikelola oleh suami. Sehingga caleg perempuan tidak dapat mengeluarkan uang sesuka hati yang mengakibatkan pada suara yang diperoleh.

Kemudian lebih lanjut juga di jelaskan bahwa kondisi ekonomi tersebut umumnya menggambarkan keadaan seseorang atau kelompok orang dalam lingkungan masyarakat berdasarkan aktivitas ekonomi, pendapatan seseorang, pekerjaan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Kaitannya dengan pelaksanaan pemilu legislatif, penting bagi para politisi perempuan peserta pemilu legislatif, untuk memperhatikan aspek kondisi ekonomi. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan pemilu legislatif biaya yang dikeluarkan oleh para caleg untuk kebutuhan pemilu terbilang sangat besar, mulai dari biaya pendaftaran peserta pemilu, kebutuhan kampanye, sampai pada biaya yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan pencoblosan. Hal ini diungkap dalam wawancaranya:

Sebagian besar politisi perempuan di wilayah Kabupaten Abdy yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu hadir dari kelompok orang-orang yang sudah berkeluarga dengan pekerjaan tetap sebagai pelaku usaha, kelompok tani dan ternak serta ibu rumah tangga yang aktif dalam kegiatan politik. Sebagai caleg kondisi ekonomi dan status dalam keluarga menjadi salah satu hambatan terbesar bagi kaum perempuan dalam kegiatan pencalonan karena para caleg harus memilih antara mengeluarkan biaya untuk kebutuhan hidup keluarga atau untuk kepentingan pemilu. Sebagian besar caleg yang berstatus ibu rumah tangga pada

akhirnya memilih tidak mengeluarkan biaya yang besar hanya untuk kepentingan pemilu legislatif tahun 2019. Selain karena dirasa biaya tersebut begitu besar, disisi lain biaya untuk kepentingan pemilu legislatif ini juga harus terlebih dahulu didiskusikan oleh para caleg perempuan dengan kepala keluarga. Permasalahan biaya yang sangat besar mengakibatkan politisi perempuan yang mendaftar sebagai caleg perempuan pada pemilu legislatif Kabupaten Abdyo seringkali menjadikan ajang tersebut sebagai sarana untuk belajar dan memperoleh pengalaman. Sehingga terlepas dari terpilih atau tidak terpilihnya caleg perempuan tersebut sebagai caleg Kabupaten Abdyo periode 2019-2024 bukanlah menjadi suatu masalah yang besar. Dengan demikian wajar apabila banyak caleg perempuan yang tidak terpilih dalam pemilu legislatif tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan dari segi pendanaan yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam kegiatan pencalonan.⁴⁷

Berdasarkan analisis ini dapat disimpulkan bahwa minimnya terpilih caleg perempuan pada pemilu legislatif Kabupaten Abdyo periode 2019-2024 merupakan hasil dari pengaruh kondisi ekonomi para politisi perempuan di Kabupaten Abdyo yang mana karena alasan pekerjaan dalam rumah tangga mengakibatkan banyak caleg perempuan di kabupaten Abdyo memilih untuk tidak mengeluarkan biaya dalam kegiatan pemilu legislatif tahun 2019.

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Rodhiah Tokoh Perempuan pada tanggal 20 Juli 2022 di Kabupaten Aceh Barat Daya

4. Biaya pemilu yang semakin mahal (politik uang)

Selain kurangnya kekuatan finansial, caleg perempuan juga diperhadapkan dengan politik uang (*money politic*) yang merebak dalam pesta demokrasi. Masyarakat meyakini bahwa politik selalu berkaitan dengan uang dan para kandidat harus mempersiapkan sejumlah uang untuk memenangkan pemilihan. Uang berperan penting dalam pembiayaan iklan, proses seleksi kandidat, kampanye, namun peran uang juga dikhawatirkan jika digunakan untuk membeli suara. Hal ini disampaikan oleh beberapa caleg perempuan dalam wawancaranya:

Salah satu faktor yang menjadi penghambat caleg perempuan itu kebanyakan kandidat laki-laki menggunakan uang, sehingga suara dibeli oleh kandidat laki-laki yang berakibat pada rendahnya suara yang diperoleh oleh kandidat perempuan. Caleg perempuan juga punya batas sendiri dalam menggunakan uang, secara uang yang digunakan juga uang dari suami dan keluarga.⁴⁸

Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa money politik yang dilakukan oleh caleg laki-laki sangat mempengaruhi suara caleg perempuan. Kebanyakan masyarakat masih tergiur dengan uang yang ditawarkan untuk membeli suara mereka. Hal ini sangat berdampak kepada rendahnya kemenangan caleg perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa perempuan dianggap kelas orang-orang lemah sehingga caleg

⁴⁸ Wawancara dengan Desi caleg perempuan DPRK Abdyo terpilih 2019-2024, Ismiati dan Maria Ulva pada tanggal 18 Juli 2022 di Kabupaten Aceh Barat Daya.

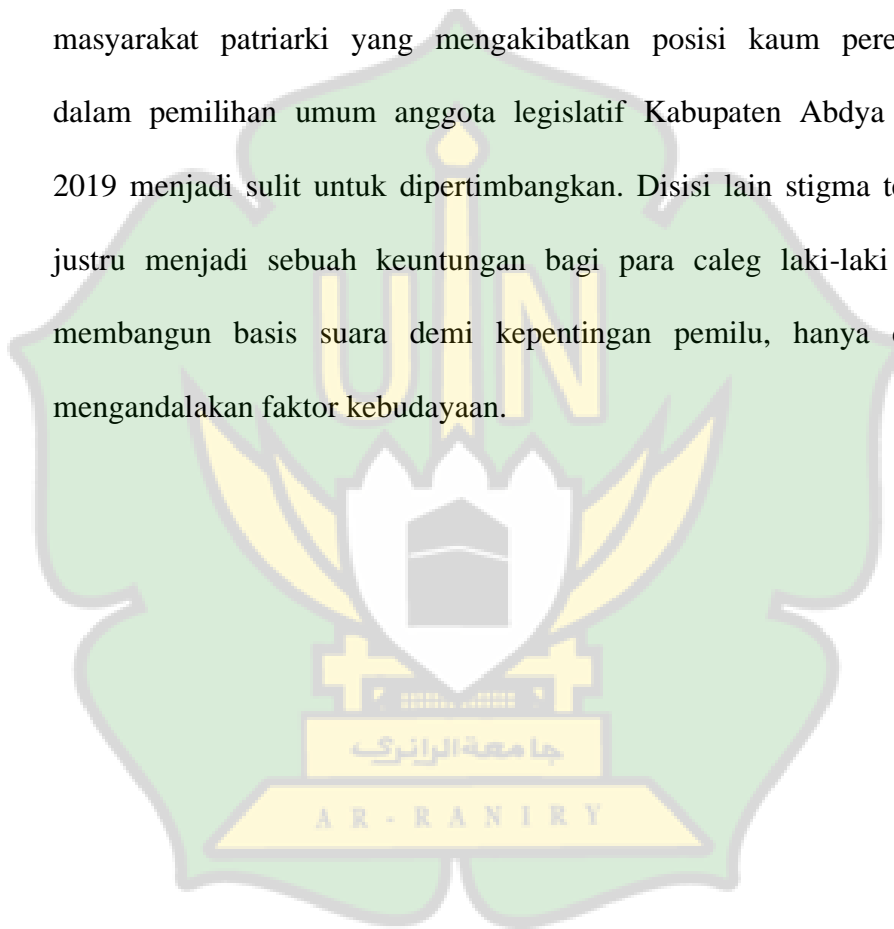
perempuan tidak mendapat prioritas di mata masyarakat. Hal ini sangat berdampak pada keterpilihan perempuan tersebut. Seperti yang terlihat bahwa yang terpilih hanya 1 caleg perempuan dari sekian banyak yang mencalonkan diri.

Selain itu budaya patriarki juga menghambat caleg perempuan dimana budaya ini berhubungan dengan suatu sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan. Istilah ini juga merujuk pada dominasi laki-laki dalam peran kepemimpinan, otoritas moral dan hak sosial. Budaya patriarki ini berarti suatu sistem kebudayaan yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dalam komunitas adat (suku) dan mendominasi dalam peran kepemimpinan serta otoritas moral dan hak sosial di suatu wilayah adat tertentu. Hal tersebut terindikasi sebagai dampak dari adanya penerapan sistem budaya patriarki di beberapa daerah dalam lingkup wilayah Kabupaten Abdya. Hal ini diungkapkan oleh aktivis perempuan dalam wawancaranya:

Kehadiran budaya patriarki sangat berpengaruh terhadap jumlah keterwakilan perempuan pada pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2019 yang diselenggarakan di Kabupaten Abdya. Penyebab utamanya adalah dalam perspektif budaya patriarki, masyarakat Abdya masih menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dan tokoh utama dalam setiap peristiwa penting yang terjadi di lingkungan masyarakat. Hingga saat ini belum pernah ditemui adanya sosok perempuan yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjadi tokoh penting atau pemuka adat dalam lingkungan budaya masyarakat Abdya. Selain itu, seorang

perempuan dari lingkungan masyarakat patriarki, tidak diberdayakan untuk mengambil peran kepemimpinan atau memperoleh kesempatan untuk berbicara di depan umum⁴⁹.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa telah muncul suatu stigma dalam kehidupan masyarakat patriarki yang mengakibatkan posisi kaum perempuan dalam pemilihan umum anggota legislatif Kabupaten Abdyta Tahun 2019 menjadi sulit untuk dipertimbangkan. Disisi lain stigma tersebut justru menjadi sebuah keuntungan bagi para caleg laki-laki dalam membangun basis suara demi kepentingan pemilu, hanya dengan mengandalkan faktor kebudayaan.



⁴⁹ Wawancara dengan Irawati aktivis perempuan Abdyta pada tanggal 12 Juli 2022 di Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Adapun yang memotivasi perempuan dalam mengikuti pemilu legislative tersebut dikarenakan adanya Tuntutan dari partai karena sudah menjadi kader, kemudian melihat perempuan terpinggirkan sehingga membuatnya ingin berjuang untuk memperbaiki hal tersebut terutama di bagian ekonomi dan pendidikan sekaligus optimis dapat dukungan karena orang tua berasal dari tokoh masyarakat serta Ingin memperjuangkan nasib perempuan di parlemen. Karena hanya perempuan yang memahami perempuan. Kemudian tantangan perempuan dapat dilihat dari Keluarga yang tidak semua mendukung perempuan terlibat dalam politik, Lingkungan sekitar yang menganggap perempuan seharusnya bekerja di rumah dan masyarakat yang masih menjunjung tinggi budaya patriarki selanjutnya, Kekuatan Finansial perempuan yang masih tergantung dengan suami, dan Biaya pemilu yang semakin mahal (politik uang), sehingga menghambat perempuan terlibat dalam pemilu.

5.2. Saran

1. Kepada caleg perempuan agar dalam proses kontestasi pemilu untuk memahami peran perempuan di dalam dunia politik sehingga kehadirannya tidak sekedar pemenuhan porsi perempuan di parlemen.
2. Kepada masyarakat khususnya masyarakat perempuan untuk lebih

mendukung caleg perempuan, karena dengan menangnya kandidat caleg perempuan akan mensejahterakan nasib perempuan.

3. Kepada parpol untuk memilih dan menempatkan caleg perempuan pada dapil yang strategis, sehingga perempuan dengan mudah meraih suara.
4. Kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menggali data lebih agar dapat menjelaskan secara lebih detail terhadap motivasi perempuan dalam pemilu



DAFTAR PUSTAKA

- Darren G. Lilleker & Karolina Koc-Michalska, Political Communication, Faculty of Media & Communication, Bournemouth University. Karolina Koc-Michalska is Associate Professor in the Communication and Culture Department, Audencia Business School, Nantes. 2016
- Eka Dian Aprilia, Motivasi Caleg Perempuan di Tinjau dari asal Partai Politik. Kesetaraan gender merupakan hal yang paling penting untuk mencegah diskriminasi yang terjadi di masyarakat, Jurnal Program Studi Psikologi Universitas Syiah Kuala, Jil. 07, No. 02, 2016.
- Fariska Novianda Beltim, Motivasi Keterlibatan Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilu 2019 di Kota Pangkalpinang Jurnal Sosial dan Saint Jil. 1 No. 8, 2021
- Johni Dimiyati, Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya, Jakarta: Kencana, 2013.
- Kristi Andersen, Working Women And Political Participation, 1952-1972, American Journal Of Political Science, Xix, 3, August 1975
- L.A. (Lisa) Lambert, Women's Motivations for Political Participation, Political Science Association Vancouver, British Columbia, June 3-7, 2008.
- Mariatul Kiptiah, Motivasi Keterwakilan Perempuan dalam Politik pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Tanah Laut. Jurnal Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Politeknik Negeri Tanah Laut Volume 5, Nomor 1, Mei 2019
- Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2014),
- Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008),
- Wawancara dengan Irmawati caleg perempuan, pada tanggal 16 Juli 2022 di Kabupaten Aceh Barat Daya
- Wawancara dengan Ismiati caleg perempuan, pada tanggal 16 Juli 2022 di Kabupaten Aceh Barat Daya
- Wawancara dengan Maria Ulva caleg perempuan, pada tanggal 15 Juli 2022 di Kabupaten Aceh Barat Daya

Wawancara dengan Irawati aktivis perempuan Abdya pada tanggal 12 Juli 2022 di
Kabupaten Aceh Barat Daya

